

Katalog: 7203002.52

Statistik

KEUANGAN

PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

2016



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



Statistik
KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

2016
Rp

STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 2016

ISBN : –
No. Publikasi :
Katalog BPS : 7203002.52
Naskah : Bidang Statistik Distribusi
Desain Sampul : Bidang Statistik Distribusi
Diterbitkan Oleh : © Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat
Dicetak Oleh : CV. Maharani

Mataram: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2017
xiv + 94 halaman; 17,6 x 25 cm

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN
STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 2016

Pengarah : Ir. Endang Tri Wahyuningsih, MM
Peanggung Jawab : Ni Kadek Adi Madri, SE
Editor : Didik Sutarmono, SE
Penulis : Nurul Islamy, S.ST

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

<https://web.bps.go.id>



Publikasi Statistik Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2016 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat memuat data tentang realisasi anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kabupaten/kota dan pemerintah desa Tahun Anggaran 2014–2015 dan rencana anggaran tahun 2016. Data tersebut dihimpun untuk memenuhi berbagai kebutuhan konsumen data.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa yang telah membantu mewujudkan penerbitan publikasi ini dengan memberikan data dan laporannya.

Semoga publikasi ini dapat memenuhi kebutuhan para konsumen data. Saran dan kritik yang konstruktif diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan terbitan mendatang.

Mataram, Desember 2017
BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kepala,

Endang Tri Wahyuningsih

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

<https://ntb.bps.go.id>



	Halaman
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Grafik	xi
Daftar Lampiran	xiii
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kegunaan	2
1.3 Ruang Lingkup dan Metode Pengumpulan Data	3
1.4 Konsep dan Definisi	4
ULASAN RINGKAS	15
2.1 Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	15
2.2 Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat	22
2.3 Keuangan Pemerintah Desa Provinsi Nusa Tenggara Barat	29

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

<https://web.bps.go.id>



No	Judul Tabel	Hal
2.1	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Ribu Rupiah), 2015–2016	16
2.2	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Ribu Rupiah), 2015–2016	21
2.3	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Nusa Tenggara Barat (Ribu Rupiah), 2014–2015	23
2.4	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2015 dan Rencana Pendapatan Tahun Anggaran 2016 (Juta Rupiah)	25
2.5	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Nusa Tenggara Barat (Ribu Rupiah), 2014–2015	26
2.6	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2015 dan Rencana Pendapatan Tahun Anggaran 2016 (Ribu Rupiah)	27
2.7	Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Nusa Tenggara Barat (Ribu Rupiah), 2015	29
2.8	Jumlah Desa Sampel Penghitungan Realisasi Pendapatan dan Belanja Desa Per Kabupaten Se-Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2015	30
2.9	Realisasi Pendapatan Pemerintah Desa Menurut Kabupaten Se-Provinsi Nusa Tenggara Barat (Ribu Rupiah), 2015	31
2.10	Realisasi Belanja Pemerintah Desa Sampel Menurut Kabupaten Se-Provinsi Nusa Tenggara Barat (Ribu Rupiah), 2015	32

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

<https://ntb.bps.go.id>



No	Judul Grafik	Hal
2.1	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Triliun Rupiah), 2013–2016	17
2.2	Komposisi Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2016	18
2.3	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Triliun), 2013–2016	18
2.4	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Triliun), 2013–2016	20
2.5	Komposisi Realisasi Belanja Langsung Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2016	21
2.6	Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2015	24
2.7	Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se–Provinsi Nusa Tenggara Barat (Ribu Rupiah), 2015	28
2.8	Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa Menurut Kabupaten Se–Provinsi Nusa Tenggara Barat (Ribu Rupiah), 2015	32

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

<https://ntb.bps.go.id>



No	Judul Lampiran	Hal
1	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dirinci Menurut Jenis Penerimaan	35
2	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dirinci Menurut Jenis Pengeluaran	49
3	Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dirinci Menurut Jenis Pembiayaan	63
4	Realisasi Penerimaan Pemerintah Desa di Kabupaten Se- Provinsi Nusa Tenggara Barat Dirinci Menurut Jenis Penerimaan	77
5	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Desa di Kabupaten Se- Provinsi Nusa Tenggara Barat Dirinci Menurut Jenis Pengeluaram	85

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

<https://htb.pps.go.id>



1.1 Latar Belakang

Dalam rangka melakukan rekonstruksi pembangunan daerah yang berkelanjutan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menduduki posisi penting sebagai instrumen untuk menentukan kebijakan umum. Dari cara pandang yang konstruktif, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Daerah, mengupayakan adanya postur APBD yang mampu mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah. Dengan demikian, pelaksanaan program pembangunan dilandasi oleh aspek transparansi dan akuntabilitas publik.

Dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan, yang diperbarui dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah mempunyai wewenang dalam menentukan arah pembangunan secara lebih mandiri. Hal ini diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selaras dengan pembangunan nasional, peran Pemerintah Daerah perlu didorong untuk mampu mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.

Salah satu aspek penting dalam implementasi kebijakan pembangunan, diantaranya adalah manajemen pengelolaan anggaran. APBD perlu dikelola secara efektif, efisien, dan ekonomis sehingga diperoleh optimalisasi capaian kebijakan. Sumber dana pendapatan harus mencerminkan kekuatan finansial di bidang pembangunan ekonomi masyarakat. Sedangkan belanja daerah harus diarahkan sesuai substansi kebutuhan sebagaimana fungsi keseluruhan unit kerja. Dengan demikian,

realisasi pendapatan dan belanja daerah mampu merefleksikan tingginya tanggung jawab moral terhadap amanah seluruh lapisan masyarakat secara berkesinambungan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah program kerja yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam tahun anggaran yang bersangkutan, dan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD, yaitu dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Oleh karena itu angka yang tertera dalam APBDes bukanlah sekedar angka-angka yang tanpa makna, tetapi merupakan program-program yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun anggaran bersangkutan.

Dalam rangka keperluan analisis dan pengambilan keputusan maupun untuk memenuhi kelengkapan informasi tentang Keuangan Negara dalam berbagai keperluan maka alasan untuk mengumpulkan data statistik tentang keuangan daerah menjadi makin diperlukan. Sebagai informasi, setiap tahun baik BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/ Kota mengumpulkan data keuangan daerah yang terdiri dari Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi, Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Keuangan Desa/Kelurahan.

1.2 Kegunaan

Secara umum statistik keuangan pemerintah daerah diperlukan antara lain:

- a. Sebagai bahan dalam penyusunan neraca ekonomi baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional seperti pendapatan regional/nasional, tabel input-output, dan neraca arus dana.

- b. Memberi gambaran tentang realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang telah dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Pemerintah Desa.
- c. Untuk mengetahui potensi dan peran sumber dana dari masing–masing daerah.
- d. Sebagai informasi bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menentukan jenis dan besarnya bantuan pembangunan untuk masing–masing daerah di bawahnya.

1.3 Ruang Lingkup dan Metode Pengumpulan Data

Pencatatan data Keuangan Pemerintah di Provinsi Nusa Tenggara Barat meliputi Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat yang dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali, dengan frekuensi mengikuti tahun anggaran yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun sebelumnya. Sedangkan pengumpulannya dilakukan dengan mengirim daftar isian atau mendatangi sumber data sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan yaitu:

1. Untuk Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi bersumber dari Biro Keuangan pada Kantor Gubernur,
2. Untuk Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersumber dari Bagian Keuangan pada Kantor Bupati/Walikota,
3. Untuk Statistik Keuangan Pemerintah Desa/Kelurahan diperoleh dari 105 desa yang terpilih sebagai sampel di 8 kabupaten.

Data yang dikumpulkan adalah anggaran dan realisasi dari APBD Provinsi, Kabupaten/Kota, dan APBDes Pemerintah Desa yang meliputi penerimaan dan pengeluaran serta data–data keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan tata pemerintahan Provinsi NTB, Kabupaten/Kota, dan Desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Jenis daftar yang digunakan:

- a. Daftar APBD–1 dan K–1, digunakan untuk mengumpulkan data tentang anggaran realisasi Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi,

- b. Daftar APBD–2 dan K–2, digunakan untuk mengumpulkan data tentang anggaran dan realisasi Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,
- c. Daftar K–3, digunakan untuk mengumpulkan data tentang anggaran dan realisasi Keuangan Pemerintah Desa.

1.4 Konsep dan Definisi

Bagian ini berisi konsep dan definisi operasional dari beberapa istilah yang digunakan dalam Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2016. Konsep tersebut mengacu pada istilah yang berkaitan dengan kegiatan keuangan pemerintah daerah, baik dari sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran.

Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota/Desa adalah realisasi atau perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Desa (APBD/APBDes) pada tiap tahun anggaran.

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana Perimbangan
3. Lain–Lain Pendapatan yang Sah

A.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang–undangan, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain–lain pendapatan asli daerah yang sah.

A.1.1. Pajak Daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang–undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan

pajak negara yang pengelolaannya dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Penerimaan pajak daerah antara lain pajak hotel, restoran, reklame, penerangan jalan, galian golongan C, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah serta bangunan, dan lain–lain.

A.1.2. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah secara langsung dan nyata kepada pembayar. Retribusi daerah antara lain retribusi pelayanan kesehatan, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, penggantian biaya cetak peta, pelayanan pendidikan, pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir dan/atau pertokoan, terminal, rumah potong hewan, tempat rekreasi/olahraga, izin mendirikan bangunan, izin peruntukan penggunaan tanah, izin trayek, dan lain–lain.

A.1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah penerimaan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank, bagian laba perusahaan milik daerah lainnya, dan bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.

A.1.4. Lain–lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah pendapatan daerah yang meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

A.2 Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari bagi hasil pajak/bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

A.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Bagi Hasil Pajak terdiri atas penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB), penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan PPh Pasal 21 orang pribadi, dan lain–lain. Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri atas iuran hak pengusahaan hutan (IHPH), provisi sumber daya hutan (PSDH), pemberian hak atas tanah negara, landrent, iuran eksplorasi/eksploitasi/royalti, pungutan pengusaha perikanan dan hasil perikanan, hasil pertambangan minyak bumi/gas alam, dan lain–lain.

A.2.2. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (fiscal gap) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

A.2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang–undangan yang berlaku, yaitu:

1. Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus dana alokasi umum.
2. Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional
3. Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil.

Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan–tujuan yang sudah digariskan.

A.3 Lain–lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan/atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain–lain pendapatan yang sah mencakup pendapatan hibah,

dana darurat yang merupakan dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa dan/atau krisis solvabilitas, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus dari pemerintah, bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dan pendapatan yang sah lainnya.

B. Belanja Daerah

Belanja Daerah terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung
2. Belanja Langsung

B.1 Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan dan sulit diukur dengan capaian prestasi kerja yang ditetapkan. Belanja tidak langsung mencakup belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

B.1.1 Belanja Pegawai Tidak Langsung adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Termasuk disini adalah uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dianggarkan dalam belanja pegawai.

B.1.2. Belanja Bunga adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung berdasarkan kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) dan berdasarkan perjanjian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

- B.1.3. Belanja Subsidi** adalah belanja yang telah dianggarkan dan digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu, agar harga jual produksi barang/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Tentunya perusahaan/lembaga tersebut menghasilkan produk atau jasa untuk pelayanan masyarakat umum.
- B.1.4. Belanja Hibah** adalah belanja yang telah dianggarkan untuk diberikan kepada pihak lain sebagai hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa, perusahaan daerah/BUMN/BUMD, badan/lembaga/organisasi swasta, ataupun kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- B.1.5 Belanja Bantuan Sosial** adalah belanja yang telah dianggarkan untuk memberikan bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan yang lainnya dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- B.1.5.1 Belanja Sosial Organisasi Kemasyarakatan** adalah pemberian bantuan kepada organisasi kemasyarakatan untuk tujuan sosial, yang dilakukan secara selektif dan mempunyai kejelasan dalam penggunaannya.
- B.1.5.2 Belanja Partai Politik** adalah pemberian bantuan kepada partai politik yang dianggarkan dengan ketentuan perundang-undangan sebagai bantuan sosial.
- B.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa** adalah belanja yang telah dianggarkan sebagai dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan

provinsi kepada kabupaten/kota, kepala desa, atau pendapatan pemerintah daerah tertentu yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja bagi hasil terdiri atas:

1. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah provinsi
2. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota
3. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa
4. Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah kabupaten/kota
5. Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa

B.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa adalah pemberian bantuan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, atau pemerintah desa, atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan. Bantuan keuangan terdiri atas:

1. Bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi
2. Bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota
3. Bantuan keuangan kepada pemerintah desa
4. Bantuan keuangan kepada pemerintah daerah/pemerintah desa lainnya

B.1.8. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas

kelebihan penerimaan daerah tahun–tahun sebelumnya yang telah ditutup.

B.2 Belanja Langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan dapat diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan. Belanja langsung mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

B.2.1 Belanja Pegawai Langsung adalah pengeluaran untuk honorarium/upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

B.2.2 Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Pembelian/pengadaan barang dan jasa yang dimaksud meliputi bahan pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atribut, pakaian kerja, pakaian khusus hari–hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan pindah tugas, pemulangan pegawai, dan lainnya.

B.2.3 Belanja Modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun. Pembentukan aset tersebut meliputi pengadaan tanah, alat– alat berat, alat–alat angkutan, alat–alat bengkel, alat–alat pertanian, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, meubelair, peralatan dapur, penghias ruangan, alat–alat studio, alat–alat komunikasi, alat–alat ukur, alat–alat kedokteran, alat– alat laboratorium, konstruksi jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon, bangunan,

buku/kepuustakaan, barang seni, pengadaan hewan/ternak dan tanaman, serta persenjataan/keamanan.

C. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran, sebaiknya surplus anggaran akan dialokasikan dalam pengeluaran pembiayaan, baik untuk pembayaran pokok hutang, maupun untuk investasi atau pembentukan dana cadangan. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

C.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman.

C.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu adalah selisih lebih dari surplus/defisit ditambah dengan pos penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pos pengeluaran pembiayaan, pada periode anggaran tahun yang lalu.

C.1.2 Pencairan Dana Cadangan adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

C.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah semua penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan oleh pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

- C.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah** adalah semua penerimaan dari pinjaman daerah, termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berjalan.
- C.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman** adalah semua penerimaan kembali dari pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.
- C.1.6 Penerimaan Piutang Daerah** adalah semua penerimaan yang berasal dari pemberian piutang daerah kepada pemerintah yang lebih tinggi maupun lebih rendah serta swasta.
- C.1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir** adalah semua penerimaan kembali yang berasal dari investasi dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
- C.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah** adalah pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran utang pokok yang jatuh tempo, dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.
- C.2.1 Pembentukan Dana Cadangan** adalah pengeluaran untuk membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya diberikan dalam satu tahun anggaran.
- C.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah** adalah pengeluaran daerah yang dialokasikan pada penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, permanen atau non permanen. Investasi ini dapat berupa deposito berjangka, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), saham, penanaman modal pada

BUMN/BUMD, pembelian obligasi dan surat utang jangka panjang.

- C.2.3 Pembayaran Pokok Utang** adalah pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- C.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah** adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau pihak ketiga.
- C.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan** digunakan untuk mengetahui pembiayaan neto, yang merupakan nilai dari pendapatan dikurangi belanja ditambah selisih antara penerimaan pembiayaan dikurangi dengan dengan pengeluaran pembiayaan.

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

<https://ntb.bps.go.id>



Kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sangat bergantung tersedianya sumber–sumber pendapatan daerah baik yang berasal dari sumber pendapatan asli daerah (PAD) maupun sumber dana yang berasal dari bantuan Pemerintah Pusat, dan atau setingkat di atasnya bagi pemerintah tingkat kabupaten dan kota. Demikian pula bagi Keuangan Pemerintah Desa, mengingat sumber–sumber pendapatan asli desa masih sangat minim, belum dapat tergali dan tereksplorasi secara memadai. Seiring dengan masih sangat terbatasnya sumber daya manusia yang profesional pada tingkat aparat pemerintah desa dan kelurahan, bagian terbesar dana desa bersumber dari bantuan pemerintah setingkat di atasnya maupun proyek–proyek yang berasal dari kementerian yang masuk di desa/kelurahan tersebut sebagai lokasi proyek.

2.1 Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kebijakan alokasi penggunaan anggaran pada pendapatan dan belanja daerah, secara umum menggambarkan kebijakan fiskal dan pengelolaannya selama tahun anggaran yang berlaku. Di sisi pendapatan, komposisi sumber dana berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan daerah lainnya. Sedangkan pada sisi pengeluaran, terdiri dari belanja langsung untuk upah/gaji pegawai, pengadaan barang dan jasa, barang modal, serta belanja tidak langsung lainnya. Jika dilihat dari postur APBD secara keseluruhan, kontribusi pendapatan utama daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat hingga tahun 2016 masih mengandalkan perolehan dari pajak daerah dan Dana Alokasi Umum (DAU).

2.1.1 Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi

Selama tahun 2016, realisasi pendapatan daerah pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tercatat sebesar 3,95 triliun rupiah, berasal dari PAD

Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2016 **15**

senilai 1,36 triliun rupiah, dana perimbangan senilai 2,58 triliun rupiah, dan pendapatan daerah lainnya senilai 0,01 triliun rupiah.

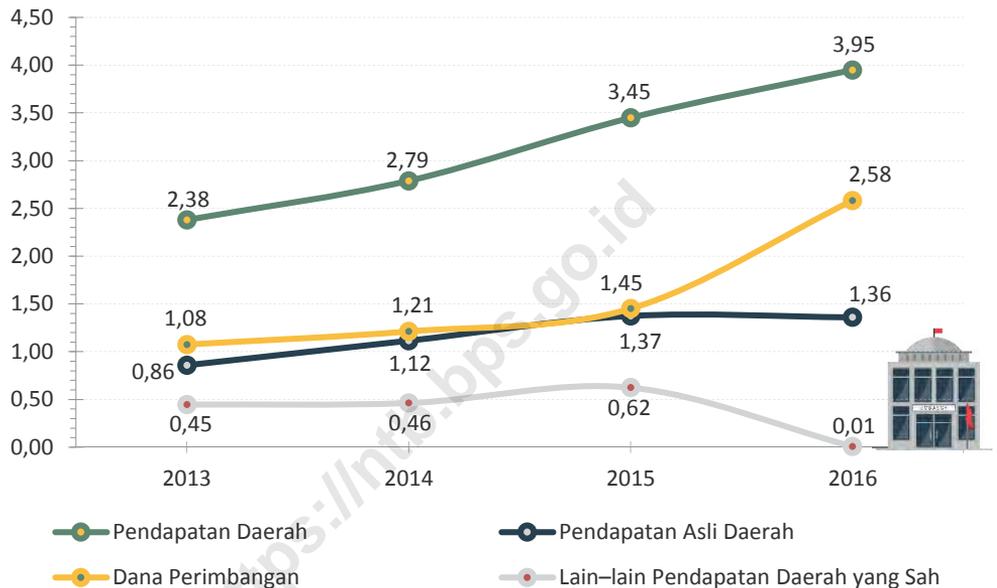
Tabel 2.1 Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Ribuan Rupiah), 2015–2016

JENIS PENERIMAAN	2015	2016	Perub. (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
A PENDAPATAN DAERAH	3 448 585 632	3 949 996 798	14,54
1 Pendapatan Asli Daerah	1 374 165 767	1 359 844 019	-1,04
1.1 Pajak Daerah	1 010 655 242	1 003 260 954	-0,73
1.2 Retribusi Daerah	24 357 011	29 792 038	22,31
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan	63 229 182	72 827 612	15,18
1.4 Lain-lain PAD yang Sah	275 924 332	253 963 415	-7,96
2 Dana Perimbangan	1 450 695 265	2 583 032 590	78,05
2.1 Bagi Hasil Pajak	134 132 452	327 753 815	144,35
2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	13 671 946	47 282 610	245,84
2.3 Dana Alokasi Umum	1 088 633 717	1 117 691 709	2,67
2.4 Dana Alokasi Khusus	214 257 150	1 090 304 456	408,88
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	623 724 600	7 120 189	-98,86
B PEMBIAYAAN DAERAH	198 747 835	198 662 806	-0,04
JUMLAH	3 647 333 467	4 148 659 604	13,75

Dilihat dari perkembangannya selama tiga tahun terakhir, pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat cenderung meningkat. Dibandingkan tahun sebelumnya, terjadi kenaikan sebesar 14,54 persen yakni dari 3,45 triliun rupiah di tahun 2015 menjadi 3,95 triliun rupiah di tahun 2016. Kenaikan ini relatif lebih tinggi dibandingkan dua tahun sebelumnya yang hanya sebesar 3,93 persen. Namun demikian, kenaikan yang terjadi pada pendapatan daerah tidak sepenuhnya diperoleh dari potensi wilayah, termasuk pengelolaan pajak daerah. Hal ini terlihat dari PAD yang menurun 1,04 persen dibandingkan tahun lalu. Selama tahun 2016, kontribusi penurunan PAD disebabkan oleh menurunnya Pajak Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah. Meskipun Retribusi Daerah dan Hasil Perusahaan

Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu, namun nilainya jauh lebih rendah dibandingkan besaran pajak daerah.

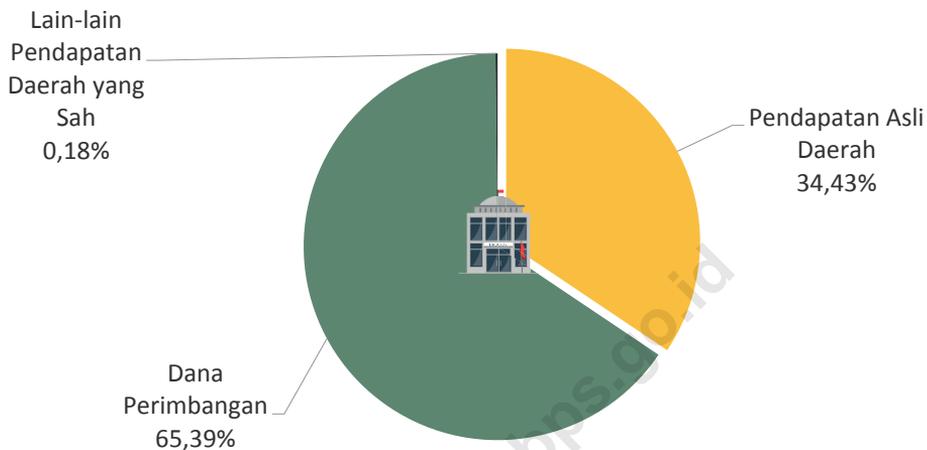
Grafik 2.1 Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Triliun Rupiah), 2013–2016



Penerimaan daerah provinsi pada tahun 2016 masih ditopang oleh dana perimbangan (transfer) sebesar 65,39 persen, dimana terjadi peningkatan 78,05 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dari 1,45 triliun rupiah di tahun 2015 menjadi 2,58 triliun rupiah di tahun 2016. Peningkatan terutama berasal dari DAK yang mengalami lonjakan lebih dari empat kali lipat. Kendatipun terjadi kenaikan sebesar 144,45 persen pada pendapatan bagi hasil pajak, namun nilainya masih lebih rendah dibandingkan DAK. Peningkatan DAK yang cukup tinggi secara keseluruhan dipicu oleh peningkatan DAK fisik. Hal ini menunjukkan tingkat keseriusan pemerintah pusat dalam mendorong peningkatan pembangunan infrastruktur di Nusa Tenggara Barat. Sementara itu, peningkatan sebesar 245,84 persen pada pendapatan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam disebabkan oleh

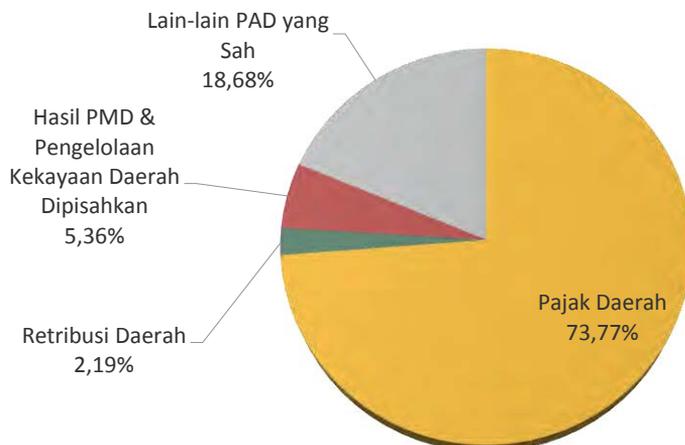
meningkatnya perolehan pajak eksplorasi akibat diberhentikannya moratorium ekspor perusahaan tambang selama tahun 2016.

Grafik 2.2 Komposisi Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2016



Dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2016, kontribusi terbesar didominasi dari perolehan pajak mencapai 73,77 persen dan pendapatan lainnya sebesar 18,68 persen. Sementara itu, kontribusi dari retribusi dan hasil perusahaan daerah serta pengelolaannya belum mampu menggerakkan potensi pendapatan daerah secara signifikan.

Grafik 2.3 Komposisi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2016



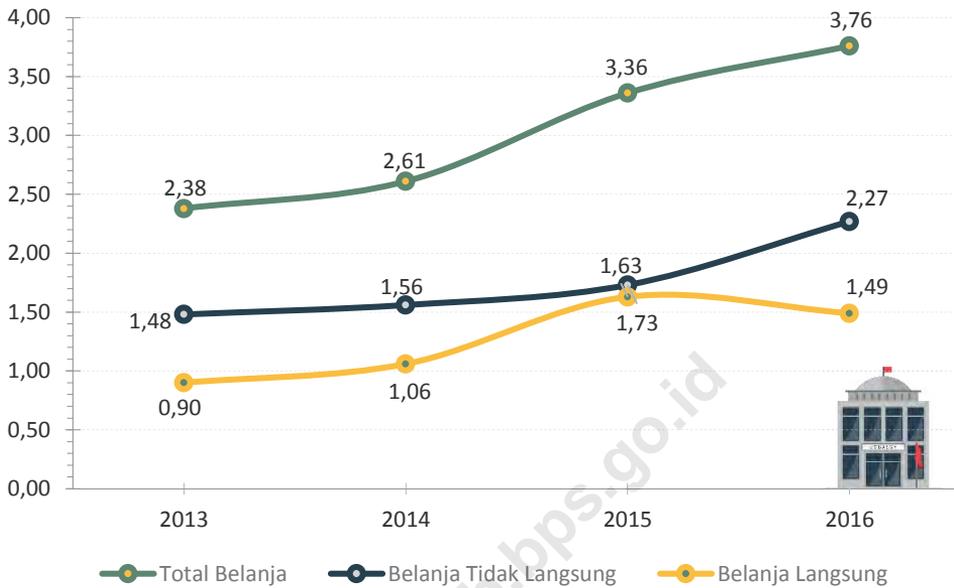
Sedangkan pendapatan daerah dari dana perimbangan, masih didominasi oleh ketergantungan pada perolehan Dana Alokasi Umum (DAU) yang mencapai 43,27 persen. Meskipun demikian, dengan meningkatnya penerimaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi senilai 1,09 miliar rupiah, menempatkan peran DAK menjadi sebesar 42,21 persen terhadap total dana perimbangan pada tahun 2016. Sementara itu, kontribusi yang sangat kecil dari pendapatan lainnya di luar PAD dan dana perimbangan, yakni hanya 0,18 persen terhadap keseluruhan pendapatan daerah, terjadi karena menurunnya komponen ini secara signifikan dibandingkan tahun 2015 yakni sebesar 98,86 persen.

2.1.2 Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Provinsi

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar selama tahun anggaran. Komponen belanja daerah merupakan kewajiban daerah yang tidak diperoleh pembayarannya kembali dalam satu tahun anggaran. Sejak tahun 2007, struktur belanja pemerintah daerah provinsi mengalami perubahan struktur dari belanja publik dan aparatur menjadi belanja langsung dan tidak langsung. Perbedaan antara belanja langsung dan tidak langsung, terletak pada kaitan anggaran belanja dengan pelaksanaan program.

Selama empat tahun terakhir, realisasi belanja tidak langsung daerah cenderung meningkat secara konsisten setiap tahun. Realisasi belanja tidak langsung pada tahun 2016 meningkat sebesar 31,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya, yakni dari 1,63 triliun menjadi 2,27 triliun. Sebaliknya, belanja langsung selama tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 8,71 persen. Penurunan tersebut terutama terjadi pada belanja modal. Hal ini dipengaruhi oleh adanya penghematan penggunaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama tahun 2016. Sementara itu, komponen pengeluaran pembiayaan daerah lainnya terlihat berfluktuatif selama periode 2013–2016.

Grafik 2.4 Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Triliun), 2013–2016



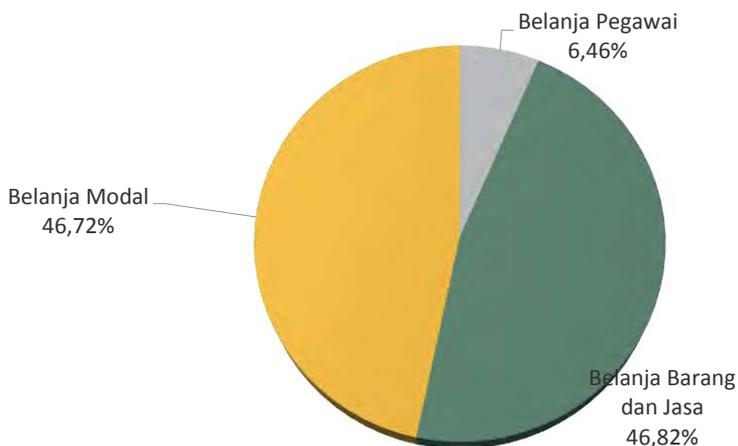
Berdasarkan kontribusinya, porsi terbesar belanja daerah selama tahun 2016 berasal dari komponen belanja tidak langsung mencapai 60,39 persen, sisanya merupakan belanja langsung sebesar 39,61 persen. Pada komponen belanja tidak langsung, didominasi oleh belanja hibah mencapai 53,23 persen, diikuti oleh belanja pegawai dan belanja bagi hasil masing–masing sebesar 21,48 persen dan 20,34 persen. Sementara komponen belanja untuk bantuan sosial dan bantuan keuangan masih relatif kecil yakni masing–masing 4,19 persen dan 0,58 persen.

Pada komponen belanja langsung, porsi belanja pegawai cukup rendah yakni 6,46 persen. Cukup tingginya porsi belanja barang dan jasa sebesar 46,46 persen dan belanja modal sebesar 46,72 persen, diharapkan sebagai daya ungkit dalam rangka optimalisasi capaian kinerja pembangunan selama tahun anggaran dan periode berikutnya. Alokasi belanja modal selama tahun 2016 mencapai 698,68 miliar rupiah, diikuti belanja barang dan jasa senilai 698,12 miliar rupiah dan belanja pegawai senilai 96,40 miliar rupiah.

Tabel 2.2 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Ribu Rupiah), 2015–2016

JENIS PENGELUARAN	2015	2016	Perub. (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
A BELANJA TIDAK LANGSUNG	1 731 408 033	2 273 102 493	31,29
1 Belanja Pegawai	564 302 754	488 238 252	-13,48
2 Belanja Bunga	0	0	0,00
3 Belanja Subsidi	0	0	0,00
4 Belanja Hibah	686 038 528	1 209 997 934	76,37
5 Belanja Bantuan Sosial	30 622 895	95 288 393	211,17
6 Belanja Bagi Hasil	435 441 046	462 284 296	6,16
7 Belanja Bantuan Keuangan	12 762 278	13 234 650	3,70
8 Pengeluaran Tidak Terduga	2 240 532	4 058 968	81,16
B BELANJA LANGSUNG	1 633 495 638	1 491 199 458	-8,71
1 Belanja Pegawai	121 707 586	96 402 736	-20,79
2 Belanja Barang dan Jasa	677 203 973	698 115 076	3,09
3 Belanja Modal	834 584 079	696 681 646	-16,52
TOTAL BELANJA	3 364 903 671	3 764 301 951	11,87
C PEMBIAYAAN DAERAH	282 429 796	384 357 653	36,09
JUMLAH	3 647 333 467	4 148 659 604	31,29

Grafik 2.5 Komposisi Realisasi Belanja Langsung Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2016



Dibandingkan dengan tahun 2015, belanja tidak langsung selama tahun 2016 meningkat dari 1,73 triliun rupiah menjadi 2,27 triliun rupiah. Dilihat dari kontribusinya terhadap keseluruhan nilai belanja daerah, peranan belanja tidak langsung meningkat dari 51,45 persen di tahun 2015 menjadi 60,39 persen di tahun 2016. Peningkatan ini diharapkan sebagai refleksi meningkatnya peran pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam memberikan layanan kepada masyarakat, sekaligus menggerakkan ekonomi berbasis usaha kecil dan menengah.

2.1.3 Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Provinsi

Realisasi pembiayaan pemerintah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan Pembiayaan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2016 sebesar 198,66 miliar rupiah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sebesar 196,75 miliar rupiah dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sebesar 1,91 miliar rupiah. Pengeluaran Pembiayaan daerah 46,00 miliar rupiah berasal dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah (Tabel 23 Lampiran 3).

2.2 Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat

2.2.1 Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Secara garis besar, realisasi pendapatan wilayah seluruh kabupaten/kota selama tahun 2015 tercatat 11,88 triliun rupiah. Di samping pendapatan daerah lain-lain, sumber dana utama pendapatan daerah relatif masih mengandalkan perolehan dana perimbangan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal ini terlihat dari cukup tingginya penerimaan dana perimbangan yang mencapai 8,23 triliun rupiah atau sebesar 69,30 persen dari keseluruhan pendapatan daerah kabupaten/kota.

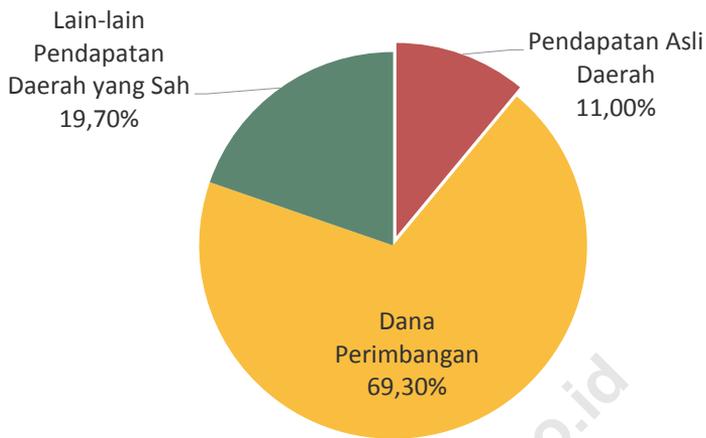
Tingginya kontribusi PAD dalam APBD merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemampuan ekonomi pasca

penyelenggaraan otonomi daerah. Pembentukan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara mandiri. Oleh karenanya, PAD dan penerimaan daerah lainnya merupakan kekuatan finansial utama dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat dari waktu ke waktu. Namun demikian, kendala yang terjadi adalah masih rendahnya penerimaan daerah dari PAD pemerintah kabupaten/kota hingga saat ini. Pada tahun 2015, PAD dari seluruh kabupaten/kota hanya senilai 1,31 triliun rupiah, meskipun mengalami peningkatan sebesar 4,26 persen dari tahun sebelumnya.

Tabel 2.3 Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se- Provinsi Nusa Tenggara Barat (Ribuan Rupiah), 2014–2015

JENIS PENERIMAAN	2014	2015	Perub. (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
A PENDAPATAN DAERAH	10 216 544 528	11 876 534 930	16,25
1 Pendapatan Asli Daerah	1 253 813 726	1 307 270 653	4,26
1.1 Pajak Daerah	422 077 841	379 120 857	-10,18
1.2 Retribusi Daerah	242 427 158	234 086 587	-3,44
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan	74 991 819	89 412 950	19,23
1.4 Lain-lain PAD yang Sah	514 316 908	604 650 259	17,56
2 Dana Perimbangan	7 419 559 865	8 230 001 267	10,92
2.1 Bagi Hasil Pajak	323 339 995	382 292 216	18,23
2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	115 174 026	123 606 441	7,32
2.3 Dana Alokasi Umum	6 271 979 524	6 585 603 855	5,00
2.4 Dana Alokasi Khusus	709 066 320	1 138 498 755	60,56
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1 543 170 937	2 339 263 010	51,59
B PEMBIAYAAN DAERAH	532 554 307	720 454 558	35,28
JUMLAH	1 0749 098 835	12 596 989 488	17,19

Grafik 2.6 Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2015



Realisasi pendapatan dari PAD pemerintah daerah kabupaten/kota cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun kontribusinya terhadap jumlah nilai pendapatan daerah masih cukup rendah. Nilai PAD umumnya berasal dari pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lainnya di luar hasil pengelolaan usaha milik daerah. Rasio PAD terhadap keseluruhan nilai pendapatan daerah pada tahun 2015 hanya sebesar 11,00 persen, angka ini sangat rendah dibandingkan rasio PAD Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap total pendapatan yang mencapai 39,85 persen. Hal ini memberikan indikasi bahwa tingkat kemandirian hampir seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota relatif masih rendah dan sangat tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Selama tahun 2015, Kota Mataram memiliki rasio PAD tertinggi dibandingkan 10 kabupaten/kota lainnya yaitu mencapai 18,93 persen atau senilai 225,08 miliar rupiah. Tingginya penerimaan pendapatan dari PAD terutama berasal dari pajak dan pendapatan lainnya. Akan tetapi, capaian ini menurun dibanding tahun 2014 yang mencapai 324,54 miliar rupiah. Sementara itu, rasio PAD terendah di Provinsi Nusa Tenggara Barat terjadi di Kota Bima yaitu hanya sebesar 4,26 persen.

Jika dilihat pendapatan daerah secara keseluruhan, pada tabel 2.4 yang tersaji dibawah terlihat bahwa realisasi pendapatan pemerintah daerah kabupaten/kota se–Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2015 yang terbesar adalah Kabupaten Lombok Timur sebesar 2,01 triliun rupiah, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah 0,22 triliun rupiah atau 10,90 persen, Dana Perimbangan 1,34 triliun rupiah atau 66,49 persen dan Lain–Lain Pendapatan yang Sah 0,45 triliun rupiah atau 22,61 persen. Realisasi pendapatan tersebut naik sebesar 18,54 persen dibandingkan realisasi pendapatan tahun 2014.

Sedangkan realisasi pendapatan pemerintah daerah tahun anggaran 2015 yang terkecil adalah Kabupaten Lombok Utara sebesar 652,34 miliar rupiah, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah 103,65 miliar rupiah atau 15,89 persen, Dana Perimbangan 469,69 miliar rupiah atau 72,00 persen, dan Lain–Lain Pendapatan yang Sah sebesar 79,00 miliar rupiah atau 12,11 persen. Realisasi pendapatan tersebut naik sebesar 11,04 persen dibandingkan realisasi pendapatan tahun 2014.

Tabel 2.4 Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se–Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2015 dan Rencana Pendapatan Tahun Anggaran 2016 (Juta Rupiah)

KABUPATEN/KOTA	REALISASI 2015	RENCANA 2016
(1)	(2)	(3)
1 Lombok Barat	1 325 716 986	1 575 142 075
2 Lombok Tengah	1 631 526 899	1 850 273 151
3 Lombok Timur	2 007 874 626	2 378 105 009
4 Sumbawa	1 304 993 662	1 523 348 650
5 Dompu	893 104 643	1 096 188 044
6 Bima	1 361 625 002	1 623 870 196
7 Sumbawa Barat	799 746 985	825 527 785
8 Lombok Utara	652 342 627	803 825 755
9 Kota Mataram	1 188 895 261	1 309 963 251
10 Kota Bima	710 708 239	808 235 026

Untuk rencana pendapatan pemerintah daerah kabupaten/kota tahun Anggaran 2016 yang terbesar adalah Kabupaten Lombok Timur yaitu sebesar 2,38 triliun rupiah atau naik 18,44 persen dibandingkan realisasi pendapatan tahun 2015 dan yang terkecil adalah Kabupaten Lombok Utara sebesar 803,83 miliar rupiah. Realisasi pendapatan daerah kabupaten/kota tahun 2015 dan rencana pendapatan Tahun Anggaran 2016 menurut jenis pendapatan lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran 1 (Tabel 2 s.d 11).

2.2.2 Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sebagaimana pada sisi pendapatan daerah, pengeluaran daerah selama tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 16,76 persen atau mencapai 11,59 triliun rupiah. Berdasarkan strukturnya, total belanja langsung dan tidak langsung masing–masing meningkat 19,48 persen dan 14,97 persen. Peningkatan belanja tidak langsung dipengaruhi oleh kenaikan yang cukup tinggi pada belanja bantuan keuangan dan belanja pegawai masing–masing sebesar 215,68 persen dan 7,22 persen.

Grafik 2.5 Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se–Provinsi Nusa Tenggara Barat (Ribu Rupiah), 2014–2015

JENIS PENGELUARAN	2014	2015	Perub. (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
A BELANJA TIDAK LANGSUNG	5 978 201 822	6 873 214 333	14,97
1 Belanja Pegawai	5 356 227 607	5 742 917 559	7,22
2 Belanja Bunga	8 141 968	6 096 490	–25,12
3 Belanja Subsidi	417 653	523 652	25,38
4 Belanja Hibah	234 501 416	249 762 899	6,51
5 Belanja Bantuan Sosial	14 3875 318	86 000 791	–40,23
6 Belanja Bagi Hasil	49 996 048	43 443 457	–13,11
7 Belanja Bantuan Keuangan	231 170 559	729 759 559	215,68
8 Pengeluaran Tidak Terduga	7 961 253	14 709 926	84,77
B BELANJA LANGSUNG	3 947 324 691	4 716 103 387	19,48
1 Belanja Pegawai	373 927 405	411 958 689	10,17
2 Belanja Barang dan Jasa	1 583 683 079	1 962 401 800	23,91
3 Belanja Modal	1 989 714 207	2 341 742 898	17,69
TOTAL BELANJA	9 925 526 513	11 589 317 720	16,76
C PEMBIAYAAN DAERAH	769 572 322	1 007 671 768	30,94

Pemerintah daerah kabupaten/kota mengurangi porsi belanja tidak langsung dari 60,23 persen di tahun 2014 menjadi 59,31 persen di tahun 2015. Porsi belanja langsung meningkat dari 39,77 persen di tahun 2015 menjadi 40,69 persen di tahun 2015. Belanja modal yang diharapkan mampu menjadi sumber daya untuk percepatan pembangunan di bidang ekonomi selama tahun 2015 meningkat 17,69 persen dibandingkan tahun sebelumnya sehingga rasio belanja modal terhadap total belanja cukup tinggi yaitu mencapai 20,21 persen di tahun 2015. Hal ini mengindikasikan pemerintah daerah kabupaten/kota relatif masih berorientasi pada pembiayaan program jangka pendek.

Tabel 2.6 Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se–Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2015 dan Rencana Pendapatan Tahun Anggaran 2016 (Ribu Rupiah)

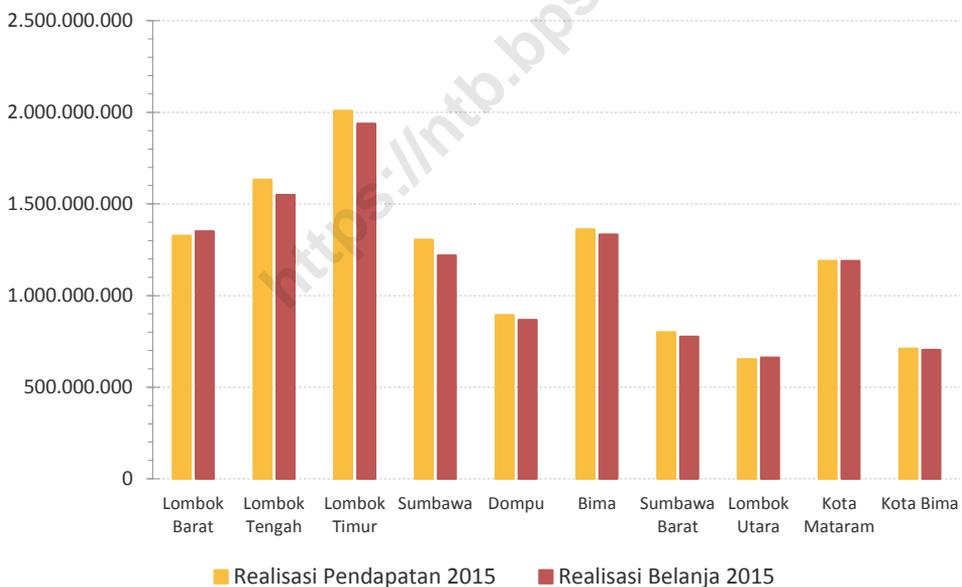
KABUPATEN/KOTA	REALISASI 2015	RENCANA 2016
(1)	(2)	(3)
1 Lombok Barat	1 351 213 319	1 563 013 287
2 Lombok Tengah	1 549 692 154	1 813 173 151
3 Lombok Timur	1 938 495 970	2 415 336 200
4 Sumbawa	1 219 496 951	1 527 851 759
5 Dompu	866 967 571	1 123 476 425
6 Bima	1 332 703 166	1 633 794 411
7 Sumbawa Barat	775 740 127	813 027 785
8 Lombok Utara	662 039 757	843 910 781
9 Kota Mataram	1 188 648 514	1 344 563 251
10 Kota Bima	704 320 191	837 495 699

Pada tabel 2.6 terlihat bahwa realisasi belanja pemerintah daerah kabupaten/kota se–Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 terbesar di Kabupaten Lombok Timur dan terkecil di Kabupaten Lombok Utara masing–masing 1,94 triliun rupiah dan 662,04 miliar rupiah. Demikian pula untuk rencana belanja pemerintah tahun 2016 yang terbesar adalah di Kabupaten Lombok Timur dan terkecil di Kota Bima masing–masing 2,41 triliun rupiah

dan 837,50 miliar rupiah. Lebih jelasnya realisasi dan rencana belanja pemerintah kabupaten/kota menurut jenis belanja dapat dilihat pada Lampiran 2 (Tabel 13 s.d 22).

Grafik 2.7 berikut menyajikan perbandingan antara realisasi pendapatan dengan realisasi belanja pada tahun 2015 dari masing-masing kabupaten/kota. Pada grafik tersebut terlihat bahwa 8 (delapan) kabupaten/kota memiliki nilai realisasi pendapatan lebih besar dari pada belanja dan 2 (dua) kabupaten memiliki nilai realisasi pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan realisasi belanjanya.

Grafik 2.7 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Nusa Tenggara Barat (Ribuan Rupiah), 2015



2.2.3 Pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi pembiayaan pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah, Pengeluaran Pembiayaan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan. Pada Tahun Anggaran 2015, Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah kabupaten/kota tertinggi adalah

Kabupaten Lombok Barat sebesar 110,06 miliar rupiah, dan realisasi penerimaan pembiayaan daerah terendah adalah Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 1,44 miliar rupiah.

Sementara itu, pada Realisasi Pengeluaran Pembiayaan daerah, Kabupaten Lombok Timur tercatat sebesar 54,08 miliar rupiah yang merupakan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan daerah tertinggi di tahun 2015. Sedangkan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan daerah terendah adalah Kota Bima sebesar 4,02 miliar rupiah. Secara rinci, Realisasi Pembiayaan pemerintah daerah kabupaten/kota Tahun Anggaran 2015 disajikan pada tabel 2.7.

Tabel 2.7 Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se- Provinsi Nusa Tenggara Barat (Ribu Rupiah), 2015

KABUPATEN/KOTA	Realisasi Pembiayaan		
	Penerimaan	Pengeluaran	SiLPA
(1)	(2)	(3)	(4)
1 Lombok Barat	110 056 858	19 022 872	65 537 653
2 Lombok Tengah	72 018 082	48 348 180	105 504 647
3 Lombok Timur	55 504 445	54 078 148	70 804 953
4 Sumbawa	108 238 740	23 937 908	169 797 543
5 Dompu	63 357 724	13 000 000	76 494 796
6 Bima	106 503 749	9 100 000	126 325 585
7 Sumbawa Barat	1 440 567	6 864 674	18 582 751
8 Lombok Utara	69 473 792	8 500 000	51 276 662
9 Kota Mataram	101 214 370	17 500 000	83 961 117
10 Kota Bima	32 646 231	4 021 711	35 012 568

2.3 Keuangan Pemerintah Desa Provinsi Nusa Tenggara Barat

2.3.1 Realisasi Pendapatan Pemerintah Desa/Kelurahan

Salah satu cara untuk melihat kemampuan desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya adalah dengan mengamati bagaimana pemerintah desa mampu menggali sumber dana secara optimal dari potensi

yang ada di desa, dan informasi ini bisa tercermin pada Pendapatan Asli Desa (PAD). Pendapatan Asli Desa sebagai salah satu komponen pendapatan desa dapat digunakan sebagai ukuran atau indikator untuk melihat kemampuan desa menyelenggarakan rumahtangganya sendiri.

Jumlah desa sampel dalam penghitungan Realisasi Pendapatan dan Belanja Desa di kabupaten Se–Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilihat pada tabel 2.8 dan pada tabel 2.9 dapat dilihat Realisasi Pendapatan Pemerintah Desa sampel selama periode tahun anggaran 2015. Dari Tabel 2.6 terlihat bahwa realisasi pendapatan pemerintah desa terbesar adalah Kabupaten Lombok Timur yaitu sebesar 235,20 miliar rupiah atau rata–rata realisasi pendapatan tiap desa sebesar 926,00 juta rupiah. Realisasi pendapatan tersebut terbesar berasal dari Alokasi Dana Desa sebesar 113,20 miliar rupiah atau 48,13 persen, terbesar kedua berasal dari Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa Lain sebesar 59,71 miliar rupiah atau 25,39 persen, dan yang ketiga berasal dari Pendapatan Asli Desa sebesar 52,61 miliar rupiah atau 22,37 persen. Sementara kontribusi lainnya di bawah 3 persen. Lebih rinci realisasi pendapatan pemerintah desa menurut jenis pendapatan dapat dilihat pada Lampiran 4 (Tabel 34 s.d 41)

Tabel 2.8 Jumlah Desa Sampel Penghitungan Realisasi Pendapatan dan Belanja Desa Per Kabupaten Se–Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2015

KABUPATEN/KOTA	JUMLAH DESA	JUMLAH SAMPEL DESA
(1)	(2)	(3)
1 Lombok Barat	122	12
2 Lombok Tengah	139	13
3 Lombok Timur	254	24
4 Sumbawa	166	17
5 Dompu	81	8
6 Bima	193	20
7 Sumbawa Barat	65	7
8 Lombok Utara	33	3

Tabel 2.9 Realisasi Pendapatan Pemerintah Desa Menurut Kabupaten Se–Provinsi Nusa Tenggara Barat (Ribu Rupiah), 2015

KABUPATEN/KOTA		REALISASI PENDAPATAN
<i>(1)</i>		<i>(2)</i>
1	Lombok Barat	124 811 590
2	Lombok Tengah	139 982 505
3	Lombok Timur	235 202 964
4	Sumbawa	146 612 361
5	Dompu	48 556 008
6	Bima	126 669 627
7	Sumbawa Barat	33 143 415
8	Lombok Utara	53 842 773

2.3.2 Realisasi Belanja Pemerintah Desa/Kelurahan

Besarnya belanja pemerintah desa yang dikelola oleh pemerintah desa, tidak terlepas dari besarnya dana hasil pendapatan. Belanja pemerintah desa secara garis besar dapat dibagi dalam dua bagian yaitu Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal. Belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Pada tabel 2.10 disajikan realisasi belanja pemerintah desa sampel di kabupaten se–Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode Tahun Anggaran 2015.

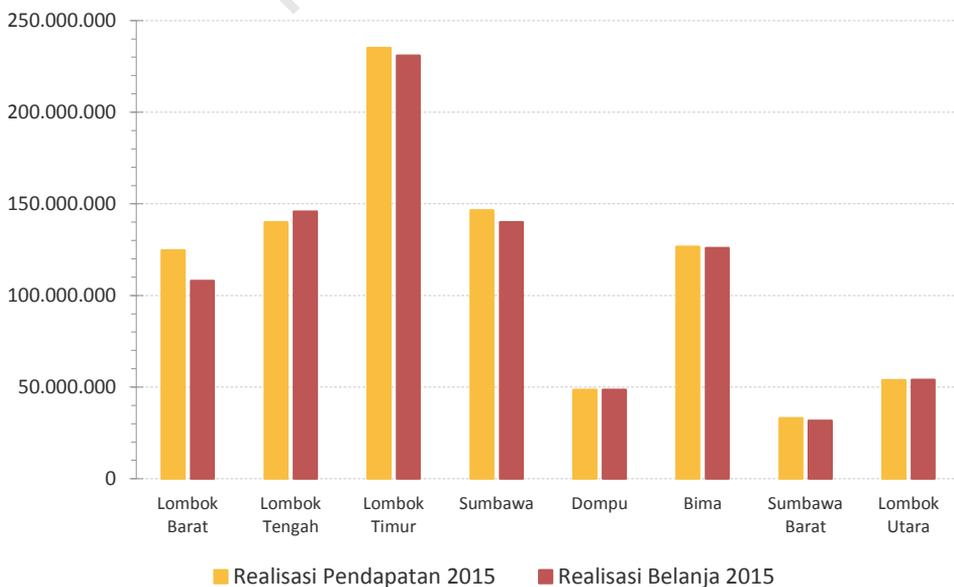
Dari Tabel 2.10 di bawah, terlihat bahwa realisasi belanja pemerintah desa terbesar adalah Kabupaten Lombok Timur yaitu sebesar adalah 230,98 miliar rupiah atau rata–rata 909,37 juta rupiah per desa. Realisasi Belanja tersebut sebagian besar digunakan untuk Belanja Langsung yaitu 163,05 miliar rupiah atau 70,59 Persen, yang sebagian besar diprioritaskan pada Belanja Modal sebesar 126,77 miliar rupiah atau 77,75 persen. Lebih jelasnya Realisasi Belanja Pemerintah desa menurut jenis belanja dapat dilihat pada Lampiran 5 (Tabel 42 s.d 49).

Tabel 2.10 Realisasi Belanja Pemerintah Desa Sampel Menurut Kabupaten Se–Provinsi Nusa Tenggara Barat (Ribu Rupiah), 2015

KABUPATEN/KOTA		REALISASI BELANJA
<i>(1)</i>		<i>(2)</i>
1	Lombok Barat	108 057 229
2	Lombok Tengah	145 787 706
3	Lombok Timur	230 978 890
4	Sumbawa	140 046 052
5	Dompu	48 632 508
6	Bima	125 952 267
7	Sumbawa Barat	31 800 246
8	Lombok Utara	53 965 773

Jika dibandingkan antara nilai Realisasi Pendapatan dan Realisasi Belanja untuk masing–masing kabupaten maka akan diperoleh perbandingan seperti tersaji pada grafik 2.8 berikut.

Grafik 2.8 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa Menurut Kabupaten Se–Provinsi Nusa Tenggara Barat (Ribu Rupiah), 2015



Dari grafik 2.8 dapat dilihat bahwa terdapat 3 kabupaten yang memiliki nilai Realisasi Pendapatan lebih kecil dari nilai Realisasi Belanja yaitu Kabupaten Lombok Tengah, Dompu, dan Lombok Utara.

Di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur, Sumbawa, Bima, dan Sumbawa Barat tercatat Realisasi Pendapatan Pemerintah Desa lebih besar dari belanjanya. Kabupaten yang memiliki selisih terbesar antara nilai Realisasi Pendapatan dengan nilai Realisasi Belanja adalah Kabupaten Lombok Barat.

<https://ntb.bps.go.id>

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

<https://ntb.bps.go.id>



LAMPIRAN 1

*Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Dirinci Menurut Jenis Penerimaan*



Halaman ini Sengaja Dikosongkan

<https://ntb.bps.go.id>

Lampiran 1

Tabel 1 Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dirinci Menurut Jenis Penerimaan (Ribu Rupiah), 2014–2016

JENIS PENERIMAAN	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
A PENDAPATAN DAERAH	2 789 427 242	3 448 585 632	3 949 996 798
1 Pendapatan Asli Daerah	1 115 060 397	1 374 165 767	1 359 844 019
1.1 Pajak Daerah	904 783 591	1 010 655 242	1 003 260 954
1.2 Retribusi Daerah	19 838 517	24 357 011	29 792 038
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan	55 670 167	63 229 182	72 827 612
1.4 Lain-lain PAD yang Sah	134 768 122	275 924 332	253 963 415
2 Dana Perimbangan	1 212 086 447	1 450 695 265	2 583 032 590
2.1 Bagi Hasil Pajak	149 750 882	134 132 452	327 753 815
2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	27 281 795	13 671 946	47 282 610
2.3 Dana Alokasi Umum	980 390 340	1 088 633 717	1 117 691 709
2.4 Dana Alokasi Khusus	54 663 430	214 257 150	1 090 304 456
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	462 280 398	623 724 600	7 120 189
3.1 Pendapatan Hibah	2 000 000	228 299	2 120 189
3.2 Dana Darurat	0	0	5 000 000
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	0
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	460 280 398	623 496 301	0
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	0
3.6 Lainnya	0	0	0
B PEMBIAYAAN DAERAH	13 828 458	198 747 835	198 662 806
JUMLAH	2 803 255 700	3 647 333 467	4 148 659 604

Tabel 2 Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat Dirinci Menurut Jenis Penerimaan (Ribu Rupiah), 2014–2016

JENIS PENERIMAAN	2014	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A PENDAPATAN DAERAH	1 142 644 085	1 325 716 986	1 575 142 075
1 Pendapatan Asli Daerah	159 069 267	171 405 340	218 185 457
1.1 Pajak Daerah	65 882 554	72 101 981	99 165 893
1.2 Retribusi Daerah	27 064 112	20 655 957	18 050 468
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan	10 242 593	11 136 354	14 710 012
1.4 Lain-lain PAD yang Sah	55 880 008	67 511 048	86 259 084
2 Dana Perimbangan	800 174 090	866 349 309	1 201 037 936
2.1 Bagi Hasil Pajak	38 015 425	25 786 621	27 701 328
2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	6 126 771	3 370 428	41 547 000
2.3 Dana Alokasi Umum	685 318 844	716 888 890	784 744 357
2.4 Dana Alokasi Khusus	70 713 050	120 303 370	347 045 251
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	183 400 728	287 962 337	155 918 682
3.1 Pendapatan Hibah	8 964 440	26 333 814	12 800 220
3.2 Dana Darurat	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	52 718 650	51 412 885	53 121 950
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	121 717 638	201 215 638	89 996 512
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	0	9 000 000	0
3.6 Lainnya	0	0	0
B PEMBIAYAAN DAERAH	56 269 739	110 056 858	15 871 212
JUMLAH	1 198 913 824	1 435 773 844	1 591 013 287

*) Data APBD

Lampiran 1

Tabel 3 Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Dirinci Menurut Jenis Penerimaan (Ribu Rupiah), 2014–2016

JENIS PENERIMAAN	2014	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A PENDAPATAN DAERAH	1 411 225 521	1 631 526 899	1 850 273 151
1 Pendapatan Asli Daerah	140 507 906	156 931 858	161 144 852
1.1 Pajak Daerah	37 283 585	40 321 885	48 714 483
1.2 Retribusi Daerah	15 869 458	18 659 244	30 081 486
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan	7 134 392	8 822 527	3 357 885
1.4 Lain-lain PAD yang Sah	80 220 471	89 128 202	78 990 998
2 Dana Perimbangan	1 011 563 786	1 095 399 531	1 533 991 357
2.1 Bagi Hasil Pajak	59 260 714	59 850 417	63 766 337
2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	5 958 125	2 937 746	41 187 389
2.3 Dana Alokasi Umum	865 423 847	906 054 748	998 650 731
2.4 Dana Alokasi Khusus	80 921 100	126 556 620	430 386 900
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	259 153 829	379 195 510	155 136 942
3.1 Pendapatan Hibah	840 852	20 978 633	7 114 262
3.2 Dana Darurat	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	54 467 702	54 241 213	50 119 036
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	203 845 275	303 975 664	97 903 644
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	0
3.6 Lainnya	0	0	0
B PEMBIAYAAN DAERAH	99 025 899	72 018 082	0
JUMLAH	1 510 251 420	1 703 544 981	1 850 273 151

*) Data APBD

Tabel 4 Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur Dirinci Menurut Jenis Penerimaan (Ribu Rupiah), 2014–2016

JENIS PENERIMAAN	2014	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A PENDAPATAN DAERAH	1 693 781 530	2 007 874 626	2 378 105 009
1 Pendapatan Asli Daerah	180 308 182	218 906 904	253 549 512
1.1 Pajak Daerah	26 037 347	33 035 051	45 804 858
1.2 Retribusi Daerah	24 999 408	35 141 369	49 310 656
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan	10 984 287	15 293 361	24 154 852
1.4 Lain-lain PAD yang Sah	118 287 140	135 437 123	134 279 146
2 Dana Perimbangan	1 243 781 004	1 335 017 555	1 882 959 701
2.1 Bagi Hasil Pajak	74 945 700	68 402 338	68 895 246
2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	5 953 632	2 947 034	41 209 622
2.3 Dana Alokasi Umum	1 039 124 622	1 079 810 803	1 162 763 206
2.4 Dana Alokasi Khusus	123 757 050	183 857 380	610 091 627
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	269 692 344	453 950 167	241 595 796
3.1 Pendapatan Hibah	1 034 031	8 221 077	7 470 693
3.2 Dana Darurat	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	41 500 217	47 693 427	69 656 340
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	220 158 096	398 035 663	164 468 763
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	7 000 000	0	0
3.6 Lainnya	0	0	0
B PEMBIAYAAN DAERAH	23 160 248	55 504 445	89 031 191
JUMLAH	1 716 941 778	2 063 379 071	2 467 136 200

*) Data APBD

Lampiran 1

Tabel 5 Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Dirinci Menurut Jenis Penerimaan (Ribuan Rupiah), 2014–2016

JENIS PENERIMAAN	2014	2015**)	2016*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A PENDAPATAN DAERAH	1 154 656 072	1 304 993 662	1 523 348 650
1 Pendapatan Asli Daerah	126 129 384	166 992 683	140 392 166
1.1 Pajak Daerah	19 863 146	26 298 392	22 785 752
1.2 Retribusi Daerah	65 420 318	86 615 141	18 456 214
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan	16 729 894	22 150 032	20 875 000
1.4 Lain-lain PAD yang Sah	24 116 026	31 929 118	78 275 200
2 Dana Perimbangan	845 159 025	895 226 003	1 201 486 474
2.1 Bagi Hasil Pajak	29 362 515	38 875 360	35 681 202
2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	9 588 061	12 694 393	12 747 148
2.3 Dana Alokasi Umum	724 963 659	757 530 420	830 267 942
2.4 Dana Alokasi Khusus	81 244 790	86 125 830	322 790 182
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	183 367 663	242 774 976	181 470 010
3.1 Pendapatan Hibah	2 180 254	2 886 611	1.924.033
3.2 Dana Darurat	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	41.859.483	55.421.086	38.637.105
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	139.327.926	184.467.279	140.908.872
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	0
3.6 Lainnya	0	0	0
B PEMBIAYAAN DAERAH	68 204 369	108 238 740	9 803 109
JUMLAH	1 222 860 441	1 413 232 402	1 533 151 759

*) Data APBD

**) Data Estimasi

Tabel 6 Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu Dirinci Menurut Jenis Penerimaan (Ribu Rupiah), 2014–2016

JENIS PENERIMAAN	2014	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A PENDAPATAN DAERAH	729 571 595	893 104 643	1 096 188 044
1 Pendapatan Asli Daerah	75 094 876	71 079 760	80 020 464
1.1 Pajak Daerah	5 927 453	6 833 540	6 996 331
1.2 Retribusi Daerah	12 360 902	15 230 667	13 830 595
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan	13 123 283	11 980 414	11 980 414
1.4 Lain-lain PAD yang Sah	43 683 238	37 035 139	47 213 124
2 Dana Perimbangan	619 218 286	698 769 868	900 776 658
2.1 Bagi Hasil Pajak	24 581 457	28 146 027	53 454 758
2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	6 967 766	4 798 041	2 351 837
2.3 Dana Alokasi Umum	521 667 743	546 420 245	582 218 962
2.4 Dana Alokasi Khusus	66 001 320	119 405 555	262 751 101
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	35 258 433	123 255 015	115 390 922
3.1 Pendapatan Hibah	3 294 299	6 742 386	2 418 827
3.2 Dana Darurat	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	23 464 134	18 671 248	26 758 816
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	0	97 841 102	86 213 279
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	8 500 000	0	0
3.6 Lainnya	0	279	0
B PEMBIAYAAN DAERAH	9 491 048	63 357 724	36 788 381
JUMLAH	739 062 643	956 462 367	1 132 976 425

*) Data APBD

Lampiran 1

Tabel 7 Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima Dirinci Menurut Jenis Penerimaan (Ribuan Rupiah), 2014–2016

JENIS PENERIMAAN	2014	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A PENDAPATAN DAERAH	1 168 251 198	1 361 625 002	1 623 870 196
1 Pendapatan Asli Daerah	100 899 000	97 589 698	108 391 237
1.1 Pajak Daerah	9 945 984	10 722 368	11 760 868
1.2 Retribusi Daerah	18 745 587	7 016 608	18 752 595
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan	4 081 544	4 482 395	4 354 399
1.4 Lain-lain PAD yang Sah	68 125 885	75 368 327	73 523 375
2 Dana Perimbangan	893 904 403	961 993 410	1 332 953 520
2.1 Bagi Hasil Pajak	24 599 770	22 698 266	30 588 108
2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	7 300 346	5 495 680	11 836 971
2.3 Dana Alokasi Umum	771 058 947	806 493 334	895 038 270
2.4 Dana Alokasi Khusus	90 945 340	127 306 130	395 490 171
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	173 447 795	302 041 894	182 525 439
3.1 Pendapatan Hibah	1 382 493	9 124 464	3 082 818
3.2 Dana Darurat	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	31 058 469	31 851 172	42 720 485
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	0	258 666 258	15 000 000
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	5 000 000	2 400 000	0
3.6 Lainnya	136 006 833	0	121 722 136
B PEMBIAYAAN DAERAH	56 067 740	106 503 749	20 024 215
JUMLAH	1 224 318 938	1 468 128 751	1 643 894 411

*) Data APBD

Tabel 8 Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Dirinci Menurut Jenis Penerimaan (Ribu Rupiah), 2014–2016

JENIS PENERIMAAN	2014	2015**)	2016*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A PENDAPATAN DAERAH	630 100 103	799 746 985	825 527 785
1 Pendapatan Asli Daerah	42 509 446	65 369 027	40 243 256
1.1 Pajak Daerah	15 421 676	23 714 728	14 179 941
1.2 Retribusi Daerah	10 486 630	16 125 846	18 938 315
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan	3 614 010	5 557 455	3 500 000
1.4 Lain-lain PAD yang Sah	12 987 130	19 970 998	3 625 000
2 Dana Perimbangan	498 875 270	597 955 607	619 235 827
2.1 Bagi Hasil Pajak	39 808 356	61 215 418	33 894 727
2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	53 683 140	82 551 408	52 685 365
2.3 Dana Alokasi Umum	349 283 834	380 327 621	402 617 985
2.4 Dana Alokasi Khusus	56 099 940	73 861 160	130 037 750
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	88.715.387	136.422.351	166.048.702
3.1 Pendapatan Hibah	107.299	164.999	18.953.616
3.2 Dana Darurat	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	52.878.115	81.313.479	33.845.529
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	35.729.973	54.943.873	74.793.892
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	37.399.165
3.6 Lainnya	0	0	1.056.500
B PEMBIAYAAN DAERAH	12 861 188	1 440 567	0
JUMLAH	642 961 291	801 187 552	825 527 785

*) Data APBD

**) Data Estimasi

Lampiran 1

Tabel 9 Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara Dirinci Menurut Jenis Penerimaan (Ribu Rupiah), 2014–2016

JENIS PENERIMAAN	2014	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A PENDAPATAN DAERAH	587 508 732	652 342 627	803 825 755
1 Pendapatan Asli Daerah	81 090 502	103 652 231	76 322 803
1.1 Pajak Daerah	48 825 192	58 019 776	54 166 727
1.2 Retribusi Daerah	13 641 498	11 125 536	10 286 890
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan	1 807 735	2 544 581	3 528 573
1.4 Lain-lain PAD yang Sah	16 816 077	31 962 338	8 340 613
2 Dana Perimbangan	416 735 618	469 693 280	553 961 116
2.1 Bagi Hasil Pajak	13 197 666	12 864 545	15 412 842
2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	10 375 895	2 937 237	2 814 264
2.3 Dana Alokasi Umum	339 993 327	362 867 848	398 209 000
2.4 Dana Alokasi Khusus	53 168 730	91 023 650	137 525 010
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	89 682 612	78 997 116	173 541 836
3.1 Pendapatan Hibah	0	1 153 190	1 250 000
3.2 Dana Darurat	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	28 329 524	27 879 856	29 849 591
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	45 779 088	37 939 193	47 176 815
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	15 574 000	0	0
3.6 Lainnya	0	12 024 877	95 265 430
B PEMBIAYAAN DAERAH	37 741 246	69 473 792	48 085 026
JUMLAH	625 249 978	721 816 419	851 910 781

*) Data APBD

Tabel 10 Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kota Mataram Dirinci Menurut Jenis Penerimaan (Ribu Rupiah), 2014–2016

JENIS PENERIMAAN	2014	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A PENDAPATAN DAERAH	1 098 226 112	1 188 895 261	1 309 963 251
1 Pendapatan Asli Daerah	324 539 561	225 076 429	255 000 000
1.1 Pajak Daerah	184 163 670	96 844 713	102 835 000
1.2 Retribusi Daerah	46 986 172	18 247 790	20 234 820
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan	6 402 077	6 219 928	6 400 000
1.4 Lain-lain PAD yang Sah	86 987 642	103 763 998	125 530 180
2 Dana Perimbangan	622 425 079	757 189 767	810 516 805
2.1 Bagi Hasil Pajak	5 273 429	49 137 783	55 766 693
2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	267 349	2 937 237	2 338 340
2.3 Dana Alokasi Umum	564 661 391	593 930 707	609 016 722
2.4 Dana Alokasi Khusus	52 222 910	111 184 040	143 395 050
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	151 261 472	206 629 065	244 446 446
3.1 Pendapatan Hibah	0	8 778 000	9 000 000
3.2 Dana Darurat	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	38 631 957	66 809 067	60 909 872
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	101 430 286	130 989 598	131 934 598
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	11 159 181	0	0
3.6 Lainnya	40 048	52 400	42 601 976
B PEMBIAYAAN DAERAH	135 682 500	101 214 370	55 000 000
JUMLAH	1 233 908 612	1 290 109 631	1 364 963 251

*) Data APBD

Lampiran 1

Tabel 11 Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kota Bima Dirinci Menurut Jenis Penerimaan (Ribuan Rupiah), 2014–2016

JENIS PENERIMAAN	2014	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A PENDAPATAN DAERAH	600 579 580	710 708 239	808 235 026
1 Pendapatan Asli Daerah	23 665 602	30 266 723	33 420 742
1.1 Pajak Daerah	8 727 234	11 228 423	11 773 800
1.2 Retribusi Daerah	6 853 073	5 268 429	8 126 263
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan	872 004	1 225 903	900 000
1.4 Lain-lain PAD yang Sah	7 213 291	12 543 968	12 620 679
2 Dana Perimbangan	467 723 304	552 406 937	621 959 425
2.1 Bagi Hasil Pajak	14 294 963	15 315 441	19 822 888
2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	8 952 941	2 937 237	4 067 178
2.3 Dana Alokasi Umum	410 483 310	435 279 239	464 125 442
2.4 Dana Alokasi Khusus	33 992 090	98 875 020	133 943 917
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	109 190 674	128 034 579	152 854 859
3.1 Pendapatan Hibah	0	0	0
3.2 Dana Darurat	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	31 096 456	29 631 422	34 611 386
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	78 094 218	98 403 157	113 243 473
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	5 000 000
3.6 Lainnya	0	0	0
B PEMBIAYAAN DAERAH	34 050 330	32 646 231	32 610 673
JUMLAH	634 629 910	743 354 470	840 845 699

*) Data APBD

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

<https://web.bps.go.id>



LAMPIRAN 2

*Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Dirinci Menurut Jenis Pengeluaran*



Halaman ini Sengaja Dikosongkan

<https://ntubps.go.id>

Lampiran 2

Tabel 12 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dirinci Menurut Jenis Pengeluaran (Ribu Rupiah), 2014–2016

JENIS PENGELUARAN	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
A BELANJA TIDAK LANGSUNG	1 558 834 866	1 731 408 033	2 273 102 493
1 Belanja Pegawai	502 984 121	564 302 754	488 238 252
2 Belanja Bunga	0	0	0
3 Belanja Subsidi	248 496	0	0
4 Belanja Hibah	536 698 599	686 038 528	1 209 997 934
5 Belanja Bantuan Sosial	25 477 063	30 622 895	95 288 393
6 Belanja Bagi Hasil	454 803 323	435 441 046	462 284 296
7 Belanja Bantuan Keuangan	38 517 986	12 762 278	13 234 650
8 Pengeluaran Tidak Terduga	105 278	2 240 532	4 058 968
B BELANJA LANGSUNG	1 055 265 236	1 633 495 638	1 491 199 458
1 Belanja Pegawai	89 028 411	121 707 586	96 402 736
2 Belanja Barang dan Jasa	543 439 395	677 203 973	698 115 076
3 Belanja Modal	422 797 430	834 584 079	696 681 646
C PEMBIAYAAN DAERAH	189 155 598	282 429 796	384 357 653
JUMLAH	2 803 255 700	3 647 333 467	4 148 659 604

Tabel 13 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat Dirinci Menurut Jenis Pengeluaran (Ribu Rupiah), 2014–2016

JENIS PENGELUARAN		2014	2015	2016*)
(1)		(2)	(3)	(4)
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	698 204 249	788 350 018	936 677 120
1	Belanja Pegawai	628 891 445	647 993 372	734 794 008
2	Belanja Bunga	0	0	3 500 000
3	Belanja Subsidi	0	0	0
4	Belanja Hibah	6 175 000	7 251 000	6 030 000
5	Belanja Bantuan Sosial	10 497 527	5 398 900	2 690 000
6	Belanja Bagi Hasil	792 814	7 197 647	11 721 636
7	Belanja Bantuan Keuangan	51 790 463	119 509 956	176 941 476
8	Pengeluaran Tidak Terduga	57 000	999 143	1 000 000
B	BELANJA LANGSUNG	417 009 313	562 863 301	626 336 167
1	Belanja Pegawai	19 747 263	34 769 362	50 269 209
2	Belanja Barang dan Jasa	194 485 051	253 762 196	289 470 992
3	Belanja Modal	202 776 999	274 331 743	286 595 966
C	PEMBIAYAAN DAERAH	83 700 262	84 560 525	28 000 000
JUMLAH		1 198 913 824	1 435 773 844	1 591 013 287

*) Data APBD

Lampiran 2

Tabel 14 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Dirinci Menurut Jenis Pengeluaran (Ribuan Rupiah), 2014–2016

JENIS PENGELUARAN	2014	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A BELANJA TIDAK LANGSUNG	942 873 699	1 038 930 376	1 294 504 187
1 Belanja Pegawai	799 185 368	846 223 145	1 047 362 105
2 Belanja Bunga	5 590 733	4 227 517	4 300 000
3 Belanja Subsidi	0	0	0
4 Belanja Hibah	88 010 195	39 417 415	17 665 000
5 Belanja Bantuan Sosial	5 263 119	1 607 415	1 901 395
6 Belanja Bagi Hasil	4 063 943	5 050 117	7 879 596
7 Belanja Bantuan Keuangan	40 484 498	141 404 849	214 396 091
8 Pengeluaran Tidak Terduga	275 843	999 918	1 000 000
B BELANJA LANGSUNG	465 860 386	510 761 778	518 668 964
1 Belanja Pegawai	27 997 399	29 750 219	34 653 200
2 Belanja Barang dan Jasa	145 158 754	273 231 318	289 506 442
3 Belanja Modal	292 704 233	207 780 241	194 509 322
C PEMBIAYAAN DAERAH	101 517 335	153 852 827	37 100 000
JUMLAH	1 510 251 420	1 703 544 981	1 850 273 151

*) Data APBD

Tabel 15 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur Dirinci Menurut Jenis Pengeluaran (Ribu Rupiah), 2014–2016

JENIS PENGELUARAN	2014	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A BELANJA TIDAK LANGSUNG	1 148 923 020	1 281 923 449	1 570 981 830
1 Belanja Pegawai	973 975 154	1 026 216 963	1 209 243 852
2 Belanja Bunga	2 551 235	1 868 973	1 000 000
3 Belanja Subsidi	0	0	0
4 Belanja Hibah	31 993 956	32 630 106	28 509 396
5 Belanja Bantuan Sosial	58 264 742	25 309 950	23 605 820
6 Belanja Bagi Hasil	0	3 054 066	9 511 552
7 Belanja Bantuan Keuangan	77 907 789	187 745 283	293 111 210
8 Pengeluaran Tidak Terduga	4 230 144	5 098 108	6 000 000
B BELANJA LANGSUNG	475 360 466	656 572 521	844 354 370
1 Belanja Pegawai	27 381 872	28 516 624	38 543 383
2 Belanja Barang dan Jasa	220 884 988	266 773 164	327 553 010
3 Belanja Modal	227 093 606	361 282 733	478 257 977
C PEMBIAYAAN DAERAH	92 658 292	124 883 101	51 800 000
JUMLAH	1 716 941 778	2 063 379 071	2 467 136 200

*) Data APBD

Lampiran 2

Tabel 16 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Dirinci Menurut Jenis Pengeluaran (Ribu Rupiah), 2014–2016

JENIS PENGELUARAN	2014	2015**)	2016*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A BELANJA TIDAK LANGSUNG	626 915 458	718 027 743	990 432 828
1 Belanja Pegawai	569 186 715	651 909 037	748 892 545
2 Belanja Bunga	0	0	0
3 Belanja Subsidi	0	0	0
4 Belanja Hibah	12 763 665	14 618 663	6 446 900
5 Belanja Bantuan Sosial	6 496 644	7 440 829	6 842 373
6 Belanja Bagi Hasil	328 700	376 471	4 142 393
7 Belanja Bantuan Keuangan	38 102 714	43 640 343	222 275 358
8 Pengeluaran Tidak Terduga	37 020	42 400	1 833 259
B BELANJA LANGSUNG	437 836 561	501 469 208	537 418 931
1 Belanja Pegawai	35 830 969	41 038 436	34 914 200
2 Belanja Barang dan Jasa	198 104 171	226 895 492	263 848 251
3 Belanja Modal	203 901 421	233 535 280	238 656 480
C PEMBIAYAAN DAERAH	158 108 422	193 735 451	5 300 000
JUMLAH	1 222 860 441	1 413 232 402	1 533 151 759

*) Data APBD

**) Data Estimasi

Tabel 17 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu Dirinci Menurut Jenis Pengeluaran (Ribu Rupiah), 2014–2016

JENIS PENGELUARAN		2014	2015	2016*)
(1)		(2)	(3)	(4)
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	484 362 928	517 766 339	703 977 789
1	Belanja Pegawai	452 951 496	432 353 968	553 784 822
2	Belanja Bunga	0	0	0
3	Belanja Subsidi	0	0	0
4	Belanja Hibah	21 068 482	36 090 859	9 472 597
5	Belanja Bantuan Sosial	10 342 950	2 206 987	0
6	Belanja Bagi Hasil	0	0	0
7	Belanja Bantuan Keuangan	0	45 999 460	112 599 114
8	Pengeluaran Tidak Terduga	0	1 115 065	28 121 256
B	BELANJA LANGSUNG	280 851 489	349 201 232	419 498 636
1	Belanja Pegawai	38 815 424	42 986 295	47 205 594
2	Belanja Barang dan Jasa	121 428 669	140 175 373	160 782 435
3	Belanja Modal	120 607 396	166 039 564	211 510 607
C	PEMBIAYAAN DAERAH	- 26 151 774	89 494 796	9 500 000
JUMLAH		739 062 643	956 462 367	1 132 976 425

*) Data APBD

Lampiran 2

Tabel 18 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bima Dirinci Menurut Jenis Pengeluaran (Ribu Rupiah), 2014–2016

JENIS PENGELUARAN	2014	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A BELANJA TIDAK LANGSUNG	707 852 223	903 011 486	1 087 767 710
1 Belanja Pegawai	655 212 299	723 754 769	845 396 160
2 Belanja Bunga	0	0	0
3 Belanja Subsidi	0	0	0
4 Belanja Hibah	17 671 840	35 955 822	16 094 532
5 Belanja Bantuan Sosial	5 849 736	372 900	1 350 000
6 Belanja Bagi Hasil	27 845 700	2 186 848	3 051 346
7 Belanja Bantuan Keuangan	0	139 092 651	218 075 672
8 Pengeluaran Tidak Terduga	1 272 648	1 648 496	3 800 000
B BELANJA LANGSUNG	407 202 298	429 691 680	546 026 701
1 Belanja Pegawai	45 023 621	64 322 792	78 376 480
2 Belanja Barang dan Jasa	159 540 622	139 291 102	192 759 370
3 Belanja Modal	202 638 055	226 077 786	274 890 851
C PEMBIAYAAN DAERAH	109 264 417	135 425 585	10 100 000
JUMLAH	1 224 318 938	1 468 128 751	1 643 894 411

*) Data APBD

Tabel 19 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Dirinci Menurut Jenis Pengeluaran (Ribu Rupiah), 2014–2016

JENIS PENGELUARAN		2014	2015**)	2016*)
(1)		(2)	(3)	(4)
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	217 113 397	339 921 112	430 073 048
1	Belanja Pegawai	235 858 426	295 718 542	338 738 576
2	Belanja Bunga	0	0	0
3	Belanja Subsidi	417 653	523 652	0
4	Belanja Hibah	13 471 960	16 891 100	9 905 692
5	Belanja Bantuan Sosial	3 580 768	4 489 555	8 032 917
6	Belanja Bagi Hasil	16 964 891	21 270 526	1 777 874
7	Belanja Bantuan Keuangan	291 655	365 676	69 617 989
8	Pengeluaran Tidak Terduga	528 044	662 061	2 000 000
B	BELANJA LANGSUNG	347 599 397	435 819 015	382 954 737
1	Belanja Pegawai	14 673 811	18 397 977	15 897 766
2	Belanja Barang dan Jasa	118 479 614	148 549 362	172 434 541
3	Belanja Modal	214 445 972	268 871 676	194 622 430
C	PEMBIAYAAN DAERAH	24 248 497	25 447 425	12 500 000
JUMLAH		642 961 291	801 187 552	825 527 785

*) Data APBD

**) Data Estimasi

Lampiran 2

Tabel 20 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara Dirinci Menurut Jenis Pengeluaran (Ribu Rupiah), 2014–2016

JENIS PENGELUARAN	2014	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A BELANJA TIDAK LANGSUNG	234 343 261	304 509 876	355 654 830
1 Belanja Pegawai	195 819 797	215 741 160	261 440 322
2 Belanja Bunga	0	0	0
3 Belanja Subsidi	0	0	0
4 Belanja Hibah	7 359 484	19 901 835	4 825 000
5 Belanja Bantuan Sosial	14 058 000	13 784 367	14 035 866
6 Belanja Bagi Hasil	0	4 307 782	5 554 083
7 Belanja Bantuan Keuangan	17 105 980	50 542 880	68 799 559
8 Pengeluaran Tidak Terduga	0	231 852	1 000 000
B BELANJA LANGSUNG	315 514 925	357 529 881	488 255 951
1 Belanja Pegawai	44 190 453	44 798 073	63 037 879
2 Belanja Barang dan Jasa	124 884 510	159 306 606	178 075 179
3 Belanja Modal	146 439 962	153 425 202	247 142 893
C PEMBIAYAAN DAERAH	75 391 792	59 776 662	8 000 000
JUMLAH	625 249 978	721 816 419	851 910 781

*) Data APBD

Tabel 21 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kota Mataram Dirinci Menurut Jenis Pengeluaran (Ribu Rupiah), 2014–2016

JENIS PENGELUARAN	2014	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A BELANJA TIDAK LANGSUNG	554 376 467	589 492 899	674 467 238
1 Belanja Pegawai	504 990 976	532 875 068	634 213 932
2 Belanja Bunga	0	0	0
3 Belanja Subsidi	0	0	0
4 Belanja Hibah	27 637 048	31 434 939	18 963 570
5 Belanja Bantuan Sosial	21 255 242	21 446 430	18 321 937
6 Belanja Bagi Hasil	0	0	0
7 Belanja Bantuan Keuangan	0	636 049	912 799
8 Pengeluaran Tidak Terduga	583 201	3 100 413	2 055 000
B BELANJA LANGSUNG	562 407 739	599 155 615	670 096 013
1 Belanja Pegawai	93 933 865	75 157 077	99 337 877
2 Belanja Barang dan Jasa	208 892 470	248 611 261	315 926 426
3 Belanja Modal	259 581 404	275 387 277	254 831 710
C PEMBIAYAAN DAERAH	117 124 406	101 461 117	20 400 000
JUMLAH	1 233 908 612	1 290 109 631	1 364 963 251

*) Data APBD

Lampiran 2

Tabel 22 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kota Bima Dirinci Menurut Jenis Pengeluaran (Ribu Rupiah), 2014–2016

JENIS PENGELUARAN	2014	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)	(4)
A BELANJA TIDAK LANGSUNG	363 237 120	391 281 035	470 200 395
1 Belanja Pegawai	340 155 931	370 131 535	448 688 698
2 Belanja Bunga	0	0	0
3 Belanja Subsidi	0	0	0
4 Belanja Hibah	8 349 786	15 571 160	12 748 400
5 Belanja Bantuan Sosial	8 266 590	3 943 458	5 940 885
6 Belanja Bagi Hasil	0	0	0
7 Belanja Bantuan Keuangan	5 487 460	822 412	822 412
8 Pengeluaran Tidak Terduga	977 353	812 470	2 000 000
B BELANJA LANGSUNG	237 682 117	313 039 156	367 295 304
1 Belanja Pegawai	26 332 728	32 221 834	38 776 318
2 Belanja Barang dan Jasa	91 824 230	105 805 926	126 950 944
3 Belanja Modal	119 525 159	175 011 396	201 568 042
C PEMBIAYAAN DAERAH	33 710 673	39 034 279	3 350 000
JUMLAH	634 629 910	743 354 470	840 845 699

*) Data APBD

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

<https://web.bps.go.id>



LAMPIRAN 3

Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dirinci Menurut Jenis Pembiayaan



Halaman ini Sengaja Dikosongkan

<https://ntubps.go.id>

Lampiran 3

Tabel 23 Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dirinci Menurut Jenis Pembiayaan (Ribu Rupiah), 2014–2016

JENIS PEMBIAYAAN	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	13 828 458	198 747 835	198 662 806
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	13 156 212	198 114 243	196 754 592
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	672 246	633 592	1 908 214
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0
1.7 Penerimaan Lainnya	0	0	0
1.8 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0	0	0
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	39 800 000	85 675 203	46 004 046
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	39 800 000	85 675 203	46 004 046
2.3 Pembayaran Pokok Utang	0	0	0
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0
2.5 Pengeluaran Lainnya	0	0	0
3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAN	149 355 598	196 754 593	338 353 607

*) Data APBD

Tabel 24 Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat Dirinci Menurut Jenis Pembiayaan (Ribu Rupiah), 2014–2016

JENIS PEMBIAYAAN	2014	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)	(4)
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	56 269 739	110 056 858	15 871 212
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	55 518 459	59 614 253	15 641 549
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	49 974 012	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	751 280	0	229 663
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	468 593	0
1.7 Penerimaan Lainnya	0	0	0
1.8 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0	0	0
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	24 086 009	19 022 872	28 000 000
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	20 600 000	16 000 000	13 000 000
2.3 Pembayaran Pokok Utang	3 486 009	3 022 872	15 000 000
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0
2.5 Pengeluaran Lainnya	0	0	0
3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAN	56 269 739	65 537 653	0

*) Data APBD

Lampiran 3

Tabel 25 Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Dirinci Menurut Jenis Pembiayaan (Ribuan Rupiah), 2014–2016

JENIS PEMBIAYAAN	2014	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)	(4)
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	99 025 899	72 018 082	0
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	94 202 068	71 939 680	0
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	4 777 961	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	78 402	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	45 870	0	0
1.7 Penerimaan Lainnya	0	0	0
1.8 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0	0	0
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	29 566 884	48 348 180	37 100 000
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10 966 884	23 548 180	12 300 000
2.3 Pembayaran Pokok Utang	18 600 000	24 800 000	24 800 000
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0
2.5 Pengeluaran Lainnya	0	0	0
3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAN	71 950 451	105 504 647	0

*) Data APBD

Tabel 26 Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur Dirinci Menurut Jenis Pembiayaan (Ribu Rupiah), 2014–2016

JENIS PEMBIAYAAN	2014	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)	(4)
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	23 160 248	55 504 445	89 031 191
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	3 946 240	42 225 507	69 817 211
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	28 980	0	28 980
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	19 185 028	0	19 185 000
1.7 Penerimaan Lainnya	0	13 278 938	0
1.8 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0	0	0
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	50 269 000	54 078 148	51 800 000
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	42 209 000	40 356 140	34 500 000
2.3 Pembayaran Pokok Utang	8 060 000	13 722 008	17 300 000
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0
2.5 Pengeluaran Lainnya	0	0	0
3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAN	42 389 292	70 804 953	0

*) Data APBD

Lampiran 3

Tabel 27 Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Dirinci Menurut Jenis Pembiayaan (Ribu Rupiah), 2014–2016

JENIS PEMBIAYAAN	2014	2015**)	2016*)
(1)	(2)	(3)	(4)
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	68 204 369	108 238 740	9 803 109
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	68 190 794	108 217 197	9 803 109
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	13 575	21 543	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0
1.7 Penerimaan Lainnya	0	0	0
1.8 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0	0	0
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	6 605 107	23 937 908	5 300 000
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6 605 107	23 937 908	5 300 000
2.3 Pembayaran Pokok Utang	0	0	0
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0
2.5 Pengeluaran Lainnya	0	0	0
3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAN	151 503 315	169 797 543	0

*) Data APBD

**) Data Estimasi

Tabel 28 Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu Dirinci Menurut Jenis Pembiayaan (Ribu Rupiah), 2014–2016

JENIS PEMBIAYAAN	2014	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)	(4)
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	9 491 048	63 357 724	36 788 381
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	9 407 225	58 340 145	36 788 381
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	5 000 000	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	83 823	17 579	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0
1.7 Penerimaan Lainnya	0	0	0
1.8 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0	0	0
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	8 000 000	13 000 000	9 500 000
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	1 000 000	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7 000 000	13 000 000	9 500 000
2.3 Pembayaran Pokok Utang	0	0	0
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0
2.5 Pengeluaran Lainnya	0	0	0
3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAN	-34 151 774	76 494 796	0

*) Data APBD

Lampiran 3

Tabel 29 Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima Dirinci Menurut Jenis Pembiayaan (Ribuan Rupiah), 2014–2016

JENIS PEMBIAYAAN	2014	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)	(4)
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	56 067 740	106 503 749	20 024 215
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	55 664 272	105 690 776	15 484 215
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	403 468	812 973	40 000
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	4 500 000
1.7 Penerimaan Lainnya	0	0	0
1.8 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0	0	0
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	3 535 000	9 100 000	10 100 000
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2 535 000	6 100 000	7 100 000
2.3 Pembayaran Pokok Utang	1 000 000	3 000 000	3 000 000
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0
2.5 Pengeluaran Lainnya	0	0	0
3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAN	105 729 417	126 325 585	0

*) Data APBD

Tabel 30 Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Dirinci Menurut Jenis Pembiayaan (Ribu Rupiah), 2014–2016

JENIS PEMBIAYAAN	2014	2015**)	2016*)
(1)	(2)	(3)	(4)
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	12 861 188	1 440 567	0
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	12 418 109	1 390 938	0
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	443 079	49 629	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0
1.7 Penerimaan Lainnya	0	0	0
1.8 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0	0	0
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	5 884 006	6 864 674	12 500 000
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5 884 006	6 864 674	12 500 000
2.3 Pembayaran Pokok Utang	0	0	0
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0
2.5 Pengeluaran Lainnya	0	0	0
3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAN	18 364 491	18 582 751	0

*) Data APBD

**) Data Estimasi

Lampiran 3

Tabel 31 Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara Dirinci Menurut Jenis Pembiayaan (Ribu Rupiah), 2014–2016

JENIS PEMBIAYAAN	2014	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)	(4)
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	37 741 246	69 473 792	48 085 026
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	37 636 096	69 391 792	48 077 826
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	82 000	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0
1.7 Penerimaan Lainnya	105 150	0	7 200
1.8 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0	0	0
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	6 000 000	8 500 000	8 000 000
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6 000 000	8 500 000	8 000 000
2.3 Pembayaran Pokok Utang	0	0	0
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0
2.5 Pengeluaran Lainnya	0	0	0
3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAN	69 391 792	51 276 662	0

*) Data APBD

Tabel 32 Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Kota Mataram Dirinci Menurut Jenis Pembiayaan (Ribu Rupiah), 2014–2016

JENIS PEMBIAYAAN	2014	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)	(4)
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	135 682 500	101 214 370	55 000 000
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	135 682 500	0	55 000 000
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0
1.7 Penerimaan Lainnya	0	0	0
1.8 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0	101 214 370	0
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	18 532 609	17 500 000	20 400 000
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	18 532 609	17 500 000	20 400 000
2.3 Pembayaran Pokok Utang	0	0	0
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0
2.5 Pengeluaran Lainnya	0	0	0
3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAN	98 591 797	83 961 117	0

*) Data APBD

Lampiran 3

Tabel 33 Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Kota Bima Dirinci Menurut Jenis Pembiayaan (Ribu Rupiah), 2014–2016

JENIS PEMBIAYAAN	2014	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)	(4)
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	34 050 330	32 646 231	32 610 673
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	34 049 996	32 610 673	32 610 673
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	334	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0
1.7 Penerimaan Lainnya	0	35 558	0
1.8 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0	0	0
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	1 100 000	4 021 711	3 350 000
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1 100 000	4 021 711	3 350 000
2.3 Pembayaran Pokok Utang	0	0	0
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0
2.5 Pengeluaran Lainnya	0	0	0
3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAN	32 610 673	35 012 568	0

*) Data APBD

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

<https://web.bps.go.id>

LAMPIRAN 4

*Realisasi Penerimaan Pemerintah Desa
di Kabupaten
Se-Propinsi Nusa Tenggara Barat
Dirinci Menurut Jenis Penerimaan*



Halaman ini Sengaja Dikosongkan

<https://ntb.bps.go.id>

Lampiran 4

Tabel 34 Realisasi Penerimaan Pemerintah Desa Kabupaten Lombok Barat Dirinci Menurut Jenis Penerimaan (Ribu Rupiah), 2014–2016

JENIS PENERIMAAN		2014	2015	2016*)
<i>(1)</i>		<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
PENDAPATAN		89 805 357	124 811 590	173 178 655
1	Pendapatan Asli Desa	14 900 555	34 252 839	24 955 882
2	Bagi Hasil Pajak	522 375	3 854 690	4 290 169
3	Bagi Hasil Retribusi	336 000	0	0
4	Alokasi Dana Desa	32 643 742	44 354 569	66 016 509
5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa Lain	37 656 295	41 733 492	77 766 762
6	Hibah	2 816 100	476 000	0
7	Sumbangan dari Pihak Ketiga	930 290	140 000	149 333

*) Data APBDes

Tabel 35 Realisasi Penerimaan Pemerintah Desa Kabupaten Lombok Tengah Dirinci Menurut Jenis Penerimaan (Ribu Rupiah), 2014–2016

JENIS PENERIMAAN		2014	2015	2016*)
<i>(1)</i>		<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
PENDAPATAN		48 622 160	139 982 505	210 331 347
1	Pendapatan Asli Desa	3 088 217	1 714 597	2 710 719
2	Bagi Hasil Pajak	2 972 883	4 311 978	3 538 171
3	Bagi Hasil Retribusi	1 392 959	1 313 367	1 871 950
4	Alokasi Dana Desa	23 486 651	91 130 465	107 980 061
5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa Lain	16 380 033	41 512 098	94 230 446
6	Hibah	1 301 417	0	0
7	Sumbangan dari Pihak Ketiga	0	0	0

*) Data APBDes

Lampiran 4

Tabel 36 Realisasi Penerimaan Pemerintah Desa Kabupaten Lombok Timur Dirinci Menurut Jenis Penerimaan (Ribu Rupiah), 2014–2016

JENIS PENERIMAAN		2014	2015	2016*)
<i>(1)</i>		<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
PENDAPATAN		144 092 665	235 202 964	295 364 796
1	Pendapatan Asli Desa	41 879 576	52 611 988	36 236 095
2	Bagi Hasil Pajak	1 282 064	5 672 991	7 795 557
3	Bagi Hasil Retribusi	0	713 048	784 481
4	Alokasi Dana Desa	45 731 954	113 201 434	126 359 489
5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa Lain	39 807 857	59 707 139	124 189 174
6	Hibah	12 035 196	0	0
7	Sumbangan dari Pihak Ketiga	3 356 018	3 296 364	0

*) Data APBDes

Tabel 37 Realisasi Penerimaan Pemerintah Desa Kabupaten Sumbawa Dirinci Menurut Jenis Penerimaan (Ribu Rupiah), 2014–2016

JENIS PENERIMAAN	2014	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)	(4)
PENDAPATAN	58 078 111	146 612 361	245 902 402
1 Pendapatan Asli Desa	21 930 754	2 009 870	1 939 083
2 Bagi Hasil Pajak	73 500	2 001 802	1 827 387
3 Bagi Hasil Retribusi	256 200	2 388 278	2 558 415
4 Alokasi Dana Desa	32 495 592	94 981 683	115 495 687
5 Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa Lain	3 178 098	45 230 728	124 081 830
6 Hibah	143 967	0	0
7 Sumbangan dari Pihak Ketiga	0	0	0

*) Data APBDes

Lampiran 4

Tabel 38 Realisasi Penerimaan Pemerintah Desa Kabupaten Dompu Dirinci Menurut Jenis Penerimaan (Ribu Rupiah), 2014–2016

JENIS PENERIMAAN	2014	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)	(4)
PENDAPATAN	18 457 803	48 556 008	112 851 679
1 Pendapatan Asli Desa	1 758 780	1 187 640	125 486
2 Bagi Hasil Pajak	0	0	0
3 Bagi Hasil Retribusi	36 000	0	0
4 Alokasi Dana Desa	6 228 423	23 389 677	55 528 807
5 Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa Lain	10 434 600	23 978 691	57 197 386
6 Hibah	0	0	0
7 Sumbangan dari Pihak Ketiga	0	0	0

*) Data APBDes

Tabel 39 Realisasi Penerimaan Pemerintah Desa Kabupaten Bima Dirinci Menurut Jenis Penerimaan (Ribu Rupiah), 2014–2016

JENIS PENERIMAAN		2014	2015	2016*)
<i>(1)</i>		<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
PENDAPATAN		29 496 299	126 669 627	218 769 718
1	Pendapatan Asli Desa	1 292 070	969 366	1 020 853
2	Bagi Hasil Pajak	466 958	2 064 022	3 022 754
3	Bagi Hasil Retribusi	1 043 064	0	0
4	Alokasi Dana Desa	13 725 133	78 842 251	94 253 470
5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa Lain	12 969 074	44 793 988	120 472 641
6	Hibah	0	0	0
7	Sumbangan dari Pihak Ketiga	0	0	0

*) Data APBDes

Lampiran 4

Tabel 40 Realisasi Penerimaan Pemerintah Desa Kabupaten Sumbawa Barat Dirinci Menurut Jenis Penerimaan (Ribu Rupiah), 2014–2016

JENIS PENERIMAAN		2014	2015	2016*)
<i>(1)</i>		<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
PENDAPATAN		14 499 605	33 143 415	67 977 271
1	Pendapatan Asli Desa	204 844	303 919	1 342 000
2	Bagi Hasil Pajak	0	0	974 667
3	Bagi Hasil Retribusi	0	0	0
4	Alokasi Dana Desa	14 255 554	17 897 341	33 408 303
5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa Lain	0	14 292 025	32 252 301
6	Hibah	0	625 474	0
7	Sumbangan dari Pihak Ketiga	39 207	24 656	0

*) Data APBDes

Tabel 41 Realisasi Penerimaan Pemerintah Desa Kabupaten Lombok Utara Dirinci Menurut Jenis Penerimaan (Ribu Rupiah), 2014–2016

JENIS PENERIMAAN		2014	2015	2016*)
<i>(1)</i>		<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
PENDAPATAN		14 032 951	53 842 773	72 621 049
1	Pendapatan Asli Desa	810 191	1 089 750	2 280 530
2	Bagi Hasil Pajak	353 761	2 674 066	3 740 468
3	Bagi Hasil Retribusi	0	0	0
4	Alokasi Dana Desa	11 010 733	38 052 506	40 237 954
5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa Lain	1 836 800	12 026 451	26 362 097
6	Hibah	9 333	0	0
7	Sumbangan dari Pihak Ketiga	12 133	0	0

*) Data APBDes



LAMPIRAN 5

*Realisasi Pengeluaran Pemerintah Desa
di Kabupaten
Se-Provinsi Nusa Tenggara Barat
Dirinci Menurut Jenis Pengeluaran*

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

<https://ntb.bps.go.id>

Lampiran 5

Tabel 42 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Desa Kabupaten Lombok Barat Dirinci Menurut Jenis Pengeluaran (Ribu Rupiah), 2014–2016

JENIS PENGELUARAN	2014	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)	(4)
BELANJA DESA	80 764 618	108 057 229	139 297 639
A BELANJA TIDAK LANGSUNG	14 028 956	27 495 202	31378126
1 Belanja Pegawai	11 284 793	16 393 220	17 202 355
2 Belanja Subsidi	466 667	0	0
3 Belanja Hibah	0	0	0
4 Belanja Bantuan Sosial	891 711	10 038 135	13 907 391
5 Belanja Bantuan Keuangan	921 144	0	0
6 Belanja Tak terduga	464 641	1 063 847	268 380
B BELANJA LANGSUNG	66 735 662	80 562 027	107919513
1 Belanja Pegawai	12 431 403	19 500 434	20 766 573
2 Belanja Barang jasa	19 964 406	11 451 944	17 789 118
3 Belanja Modal	34 339 853	49 609 649	69 363 822
C PEMBIAYAAN	108 518	-2 099 080	-20 249 520

*) Data APBDes

Tabel 43 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Desa Kabupaten Lombok Tengah Dirinci Menurut Jenis Pengeluaran (Ribu Rupiah), 2014–2016

JENIS PENGELUARAN	2014	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)	(4)
BELANJA DESA	47 301 213	145 787 706	205 799 673
A BELANJA TIDAK LANGSUNG	29 692 452	43 705 279	54369107
1 Belanja Pegawai	23 893 046	33 669 769	38 128 129
2 Belanja Subsidi	0	0	0
3 Belanja Hibah	3 550 584	5 992 824	11 176 170
4 Belanja Bantuan Sosial	1 849 414	3 636 284	4 718 022
5 Belanja Bantuan Keuangan	0	236 250	236 250
6 Belanja Tak terduga	399 408	170 152	110 536
B BELANJA LANGSUNG	17 608 761	102 082 427	151430566
1 Belanja Pegawai	1 969 358	12 409 550	21 630 350
2 Belanja Barang jasa	4 078 179	37 947 571	41 038 806
3 Belanja Modal	11 561 224	51 725 306	88 761 410
C PEMBIAYAAN	-595 047	5 819 248	-1 891 698

*) Data APBDes

Lampiran 5

Tabel 44 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Desa Kabupaten Lombok Timur Dirinci Menurut Jenis Pengeluaran (Ribu Rupiah), 2014–2016

JENIS PENGELUARAN	2014	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)	(4)
BELANJA DESA	144 082 200	230 978 890	292 912 976
A BELANJA TIDAK LANGSUNG	76 294 685	67 931 792	70519503
1 Belanja Pegawai	40 562 184	52 657 972	58 474 370
2 Belanja Subsidi	5 577 091	0	0
3 Belanja Hibah	7 145 695	0	0
4 Belanja Bantuan Sosial	20 212 957	12 203 336	8 766 559
5 Belanja Bantuan Keuangan	2 409 399	2 581 518	3 224 343
6 Belanja Tak terduga	387 359	488 966	54 231
B BELANJA LANGSUNG	67 787 515	163 047 098	222393473
1 Belanja Pegawai	8 764 141	775 483	1 526 212
2 Belanja Barang jasa	11 199 943	35 497 568	50 802 755
3 Belanja Modal	47 823 431	126 774 047	170 064 506
C PEMBIAYAAN	-10 465	2 920 066	4 315 955

*) Data APBDes

Tabel 45 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Desa Kabupaten Sumbawa Dirinci Menurut Jenis Pengeluaran (Ribu Rupiah), 2014–2016

JENIS PENGELUARAN		2014	2015	2016*)
(1)		(2)	(3)	(4)
BELANJA DESA		57 043 267	140 046 052	236 123 267
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	27 301 551	26 677 891	41005433
1	Belanja Pegawai	23 397 874	21 294 407	31 862 970
2	Belanja Subsidi	175 164	98 379	95 678
3	Belanja Hibah	8 925	745 792	957 250
4	Belanja Bantuan Sosial	2 868 808	3 382 753	7 181 983
5	Belanja Bantuan Keuangan	476 280	0	35 000
6	Belanja Tak terduga	374 500	1 156 560	872 552
B	BELANJA LANGSUNG	29 741 716	113 368 161	195117834
1	Belanja Pegawai	2 519 850	19 469 343	25 805 221
2	Belanja Barang jasa	17 062 922	36 996 688	40 456 516
3	Belanja Modal	10 158 944	56 902 130	128 856 097
C	PEMBIAYAAN	-474 845	-64 424	1 728 747

*) Data APBDes

Lampiran 5

Tabel 46 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Desa Kabupaten Dompu Dirinci Menurut Jenis Pengeluaran (Ribuan Rupiah), 2014–2016

JENIS PENGELUARAN	2014	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)	(4)
BELANJA DESA	18 417 591	48 632 508	112 851 679
A BELANJA TIDAK LANGSUNG	11 151 783	19 613 025	47058892
1 Belanja Pegawai	10 438 200	18 085 779	33 798 272
2 Belanja Subsidi	0	0	0
3 Belanja Hibah	0	85 302	214 632
4 Belanja Bantuan Sosial	619 443	794 142	1 317 785
5 Belanja Bantuan Keuangan	0	60 840	178 971
6 Belanja Tak terduga	94 140	586 962	11 549 232
B BELANJA LANGSUNG	7 265 808	29 019 483	65792787
1 Belanja Pegawai	1 776 321	3 962 736	9 476 424
2 Belanja Barang jasa	2 256 192	7 175 790	15 789 816
3 Belanja Modal	3 233 295	17 880 957	40 526 547
C PEMBIAYAAN	-31 194	90 000	0

*) Data APBDes

Tabel 47 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Desa Kabupaten Bima Dirinci Menurut Jenis Pengeluaran (Ribu Rupiah), 2014–2016

JENIS PENGELUARAN	2014	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)	(4)
BELANJA DESA	29 386 551	125 952 267	217 424 052
A BELANJA TIDAK LANGSUNG	19 361 825	55 407 220	63 797 763
1 Belanja Pegawai	16 035 042	55 055 677	63 622 163
2 Belanja Subsidi	11 667	0	0
3 Belanja Hibah	0	0	0
4 Belanja Bantuan Sosial	3 315 116	0	0
5 Belanja Bantuan Keuangan	0	30 167	60 333
6 Belanja Tak terduga	0	321 376	115 267
B BELANJA LANGSUNG	10 024 726	70 545 047	153 626 289
1 Belanja Pegawai	1 364 697	11 602 848	26 338 299
2 Belanja Barang jasa	3 697 923	20 659 861	32 256 979
3 Belanja Modal	4 962 106	38 282 338	95 031 011
C PEMBIAYAAN	-100 086	436 997	16 965

*) Data APBDes

Lampiran 5

Tabel 48 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Desa Kabupaten Sumbawa Barat Dirinci Menurut Jenis Pengeluaran (Ribuan Rupiah), 2014–2016

JENIS PENGELUARAN	2014	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)	(4)
BELANJA DESA	14 056 940	31 800 246	67 262 281
A BELANJA TIDAK LANGSUNG	6 158 029	7 728 221	7746312
1 Belanja Pegawai	5 864 505	6 385 098	7 083 812
2 Belanja Subsidi	0	0	0
3 Belanja Hibah	293 524	671 245	0
4 Belanja Bantuan Sosial	0	345 878	0
5 Belanja Bantuan Keuangan	0	318 000	662 500
6 Belanja Tak terduga	0	8 000	0
B BELANJA LANGSUNG	7 898 911	24 072 025	59515969
1 Belanja Pegawai	4 972 021	10 103 125	10 298 625
2 Belanja Barang jasa	1 827 023	1 833 572	5 792 710
3 Belanja Modal	1 099 867	12 135 328	43 424 634
C PEMBIAYAAN	877 561	-1 125 536	-714 990

*) Data APBDes

Tabel 49 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Desa Kabupaten Lombok Utara Dirinci Menurut Jenis Pengeluaran (Ribu Rupiah), 2014–2016

JENIS PENGELUARAN	2014	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)	(4)
BELANJA DESA	13 129 233	53 965 773	72 621 049
A BELANJA TIDAK LANGSUNG	6 659 388	11 338 500	13 384 800
1 Belanja Pegawai	6 319 413	11 302 500	13 384 800
2 Belanja Subsidi	0	0	0
3 Belanja Hibah	77 793	0	0
4 Belanja Bantuan Sosial	184 249	11 000	0
5 Belanja Bantuan Keuangan	0	0	0
6 Belanja Tak terduga	77 933	25 000	0
B BELANJA LANGSUNG	6 469 845	42 627 273	59 236 249
1 Belanja Pegawai	1 512 917	4 732 800	6 316 800
2 Belanja Barang jasa	887 557	2 840 362	5 362 444
3 Belanja Modal	4 069 371	35 054 111	47 557 005
C PEMBIAYAAN	1 206 623	123 000	0

*) Data APBDes

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Gungung Rinjani No. 2, Mataram 83125

Telp. (0370) 621385, Fax. (0370) 623801

Homepage: <http://ntb.bps.go.id> Email: ntb@bps.go.id